



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Suatu Studi tentang Kemandirian Keuangan Daerah
di Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal:	Harah	Klass
Terdin. di:	09 MAR 2006	339.2
No. induk:		SDF
Pembimbing:	Jm	P

Disusun Oleh :

LUFU AMARILIANA SOFIA

NIM. 010910201065

Pembimbing I

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 131 759 529

Pembimbing II

Drs. H. Soeranto Soerantomo

NIP. 130 518 485

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2005



PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi guna memenuhi salah
Satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada hari : Selasa
Tanggal : 24 Januari 2006
Pukul : 08.00 WIB

Tim Penguji

Ketua

Dra. Anastasya Murdiastuti M.Si
NIP. 131 658 011

Sekretaris

Drs. Anwar M.Si
NIP. 130 518 485

Anggota Penguji

Drs. H. Socranto Soerantomo
NIP. 130 518 485

Drs. Abdul Kholiq Ashari M.Si
NIP. 131 832 305

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Dr. H. Ung Nasdia BSW, MS

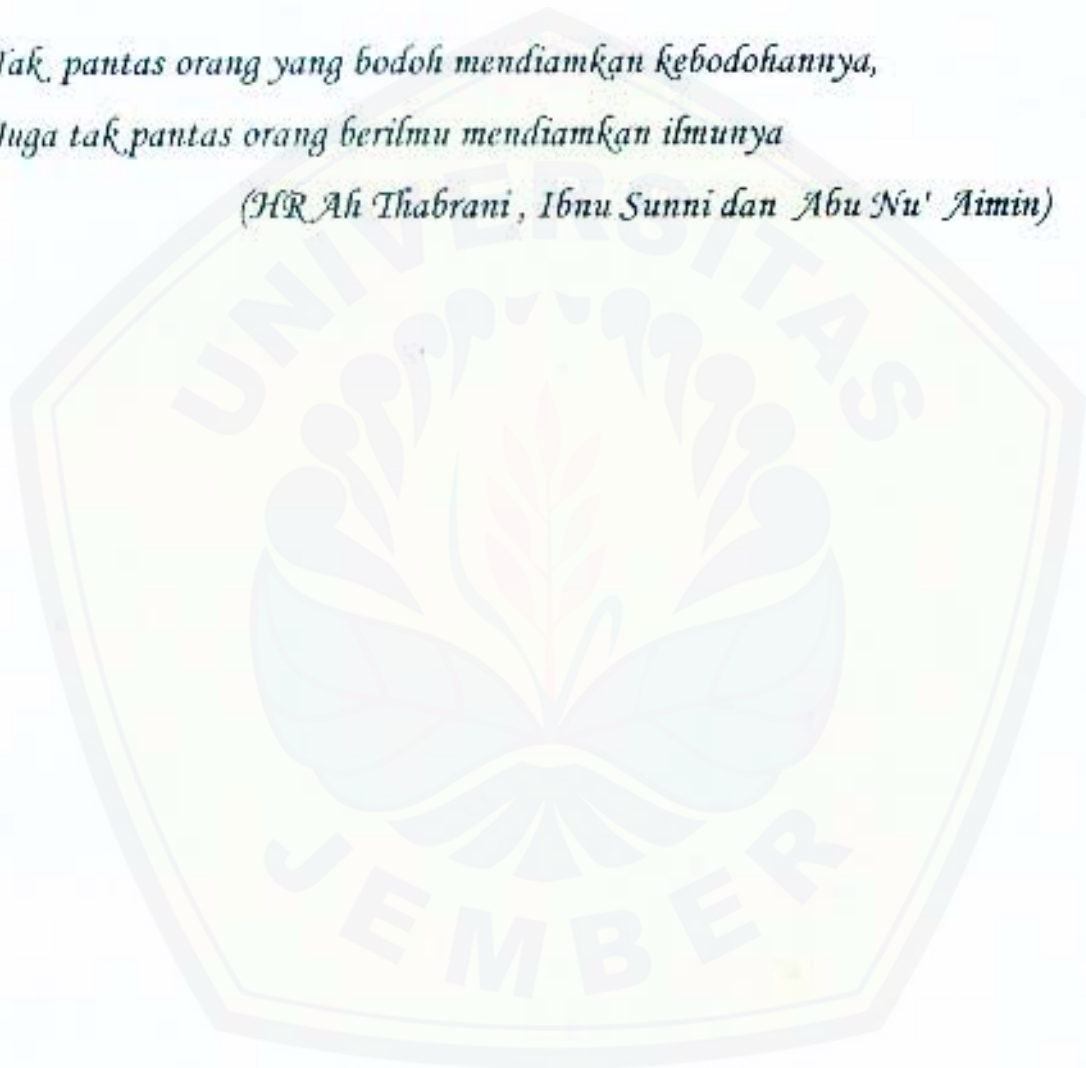
NIP. 130 674 836

MOTTO

Tak pantas orang yang bodoh mendiamkan kebodohnya,

Juga tak pantas orang berilmu mendiamkan ilmunya

(HR Ah Thabrani, Ibnu Sunni dan Abu Nu' Aimin)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati persembahkan karya sederhana ini

Kepada :

Kedua Orang Tuaku Dra. DWI NUGRAHENI dan

Drs. SIDIK AMANU

yang selalu dihati

Untuk segala cahaya yang tiada redup,
menjadikan gelap menjadi terang

Untuk doa kesuksesan Yang tiada putus menyertai
dalam setiap langkahku

Semoga karya ini merupakan awal dari kesuksesanku.

Kedua saudaraku mbak MIFTA MURSIDATUL ULVA serta suami, dan adikku

RINANZA ZULMI ALHAMRI

Yang kusayangi,

Untuk segala dorongan dan kebahagiaan

ALMAMATERKU

Yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini dalam proses belajar di Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yaitu dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Suatu Studi tentang Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung) “. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) pada Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Banyak tantangan dan rintangan yang dijumpai dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga peneliti tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk dan pengamatan dari dosen pembimbing serta berbagai pihak yang telah bersedia membantu dengan tulus dan ikhlas. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ung Nasdia BS,W,MS selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Agus Subarsono, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi petunjuk, masukan, nasehat, dan saran kepada peneliti demi terselesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Soeranto Socrantomo selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan, nasehat, dan saran kepada peneliti demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Hendro Muljono selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada peneliti selama belajar di Universitas Jember.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di perguruan tinggi.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Tulungagung beserta staf, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian karya ilmiah ini.
9. Bapak Drs. Edy Suyanto, Msi. selaku Kepala Sekretariat Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung beserta staf.
10. Sahabatku Herlin dan Andi serta seluruh teman-teman AN '01, yang telah membantu dan memberikan kritik serta saran dan semangat demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Arek – arek Bangka Raya 10 (Ida, Dini, Sari, Rury dan “specialy Neni”) yang telah memberikan dorongan serta semangat bagi penulis.
12. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada beliau yang telah penulis sebutkan diatas.

Penulis sadar karya tulis ini belum bisa dikatakan sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna mencapai kesempurnaan karya tulis skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan Kesejahteraan.

Jember, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teori	8
1.4.1 Otonomi Daerah	11
A. Sharing of power	12
B. Distribution of Income	14
C. Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kemandirian daerah	14
1.4.2 Desentralisasi Fiskal.....	15
1.4.3 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	17
1.4.4 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
1.4.5 Konsep Kemandirian Keuangan Daerah	23
1.5 Hipotesis.....	26
1.6 Definisi Operasional.....	29
1.7 Model Penelitian	30

1.8 Metode Penelitian	31
1.8.1 Tipe Penelitian	31
1.8.2 Obyek Penelitian	31
1.8.3 Lokasi Penelitian	32
1.8.4 Tehnik pengumpulan data	32
1.8.5 Tehnik Analisis Data dan Uji Hipotesis	33
BAB II DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN	39
2.1 Pengantar	39
2.2 Letak Geografis	39
2.3 Pemerintahan	40
2.4 Penduduk dan Tenaga Kerja	43
2.5 Sosial Budaya	45
2.6 Pertanian	46
2.7 Industri	48
2.8 Pedagangan	49
2.9 Perhubungan	50
2.10 Keuangan	51
2.11 Pendapatan Regional	52
BAB III PENYAJIAN DATA	54
3.1 Pengantar	54
3.2 Gambaran Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung	54
3.3 Gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung	58
3.4 Gambaran APBD Kabupaten Tulungagung	62
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	65
4.1.1 PAD Kabupaten Tulungagung	65
4.1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	66
4.1.3 Uji asumsi Klasik	68
A. Uji Normalitas	68
B. Uji Auto Korelasi	68
C. Uji Heteroskedastisitas	68

4.1.4 Analisis Regresi	68
4.1.5 Analisis Hasil	69
A. Koefisien Determinasi	69
B. Uji Hipotesis (hipotesis I)	69
4.2 Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi ...	71
4.2.1 Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah	72
4.2.2 Indek Kemampuan Rutin	73
4.2.3 Uji Hipotesis (hipotesis II)	74
4.3 Pembahasan	75
4.3.1 Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..	75
4.3.2 Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Model Penelitian "Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	30
Gambar II	Kurva uji hipotesis dua arah pengaruh PAD terhadap Kemandirian keuangan daerah dengan uji t	71
Gambar III	Kurva Uji hipotesis satu arah Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendapatan Daerah dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 - 2004	4
Tabel 2	Proporsi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004	4
Tabel 3	PAD dan rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2000 2004	5
Tabel 4	Proporsi PAD dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2001 – 2004.	5
Tabel 5	Desa / Kelurahan, Dusun, RT, dan RW menurut Kecamatan, Tahun 2004	41
Tabel 6	Banyak Desa / Kelurahan dan Klasifikasinya menurut Kecamatan, Tahun 2004	42
Tabel 7	Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2004	43
Tabel 8	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2004	44
Tabel 9	Produksi Padi dan Palawija menurut Jenis dan Harga, Tahun 2004	47
Tabel 10	Perdagangan dan Bentuk Usaha menurut Kecamatan, Tahun 2004.	49
Tabel 11	Kendaraan yang ada di Tulungagung menurut Jenis (Kendaraan Wajib Uji) Tahun 2004	50
Tabel 12	Inflasi Menurut Bulan, Tahun 2004	52
Tabel 13	Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung menurut Sumber-sumbernya, Tahun Anggaran 2001 – 2004	55
Tabel 14	Pertumbuhan PAD Kabupaten Tulungagung menurut Sumber-sumbernya, Tahun Anggaran 2001 – 2004	56
Tabel 15	Penerimaan Daerah menurut Sumber-sumbernya Kabupaten	

	Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004	59
Tabel 16	Pertumbuhan Penerimaan Daerah menurut Sumber-sumbernya Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004	60
Tabel 17	APBD dan Pertumbuhannya, Tahun Anggaran 2001 – 2004	63
Tabel 18	Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2000 - 2004	66
Tabel 19	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004	67
Tabel 20	Tabel hasil analisis regresi	69
Tabel 21	Tabel Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2001 – 2004	72
Tabel 22	IKR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2001 – 2004	73



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---------------|---|
| Lampiran I | Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung |
| Lampiran II | Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung. |
| Lampiran III | Hasil Rgresi Linier Sederhana |
| Lampiran IV | Uji Autokorelasi Durbin-Waston |
| Lampiran V | Grafik Regresi |
| Lampiran VI | Daftar tabel t |
| Lampiran VII | Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi |
| Lampiran VIII | Surat Ijin melakukan penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember |
| Lampiran IX | surat keterangan melakukan survai dari Bakesbang Kabupaten Tulungagung |
| Lampiran X | Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung |
| Lampiran XI | Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Sekretariat Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian merupakan inti dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana setiap daerah harus memiliki kemandirian. Karena sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dengan lebih mandiri. Artinya dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian daerah memegang peranan yang sangat penting. Dalam konfigurasi normatif, Pada tahun 1998 Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR No. XV/ MPR/98 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yaitu No. 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No 32 Tahun 2004, dan diikuti dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua Undang-Undang baru tersebut menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada intinya pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada tiga hal berikut ini, yaitu : (1) *Sharing of power* atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) *Distribution of Income* atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; (3) Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kemandirian daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya *sharing of power* dan *Distribution of income* adalah dalam rangka kemandirian daerah.

Menurut Widjaya (1992:32) pengertian otonomi bagi suatu daerah harus mampu:

1. Berinisiatif sendiri artinya dalam menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana dan pelaksanaannya.
2. Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang *qualified*.
3. Membuat peraturan sendiri (disebut dengan Perda).
4. Menggali sumber keuangan sendiri dalam menetapkan pajak, retribusi dan lain-lain.

Menurut Bjorn Hettne (2001 : 309) kemandirian berarti percaya pada diri sendiri, terutama mengandalkan sumberdaya sendiri baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, dan kemampuan mencapai tujuan sendiri serta kemampuan mengambil keputusan yang otonom, la tidak tergantung pada pengaruh dan kekuatan luar yang dapat berubah menjadi tekanan.

Mengacu pada pendapat Hettne dan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, maka kemandirian harus dimiliki oleh setiap daerah, hal tersebut disebabkan oleh karena :

1. Dengan kemandirian, daerah dapat mengetahui tingkat otonom
2. Dengan kemandirian, daerah dapat mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengurus keuangan daerah.
3. Dengan Kemandirian, kebijakan manajemen keuangan daerah yang terwujud dari Peraturan daerah (perda)

Kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu ditingkatkan, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih mandiri. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan (Kaho, 1998:125), Jadi keuangan merupakan faktor utama untuk mengetahui kemandirian suatu daerah. Pentingnya keuangan bagi suatu daerah sebagaimana dikemukakan oleh Pamudji, yang dikutip oleh Situmorang (1993:196) sebagai berikut:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Sedangkan syarat agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah bila daerah tersebut mempunyai prosentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, minimal sebesar 30% (Widjaya, 1992:41). Dengan PAD sebesar lebih dari 30% dari total penerimaan daerah mengindikasikan daerah setidaknya dapat membiayai pengeluaran rutin dalam

melaksanakan pemerintahan. Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari peran pemerintah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan,
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
3. Pelayanan publik (Syarifudin, 2001 : 1).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan Pemerintah Daerah yang sangat vital disamping dana perimbangan dari Pusat. Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam pembangunan, apabila daerah memiliki cukup dana terutama dana yang berasal dari penerimaan sumber-sumber PAD. Hal ini disebabkan karena daerah dapat melakukan penataan anggaran yang lebih fleksibel dalam artian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terutama dalam penggunaan anggaran untuk menunjang Pembangunan perekonomian kerakyatan (Soekarwo, 2003:95).

Daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup dan memadai untuk membawa penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Penerimaan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam kenyataan sekarang, komponen PAD masih sangat kecil persentasenya, sehingga pada umumnya masih jauh dari mencukupi, meskipun hanya untuk membiayai kegiatan rutin daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai daerah otonom dengan kemampuan keuangan diharapkan dalam jangka panjang dapat membiayai sendiri pengeluaran rutinnnya. Pada era otonomi daerah sumber dan PAD diharapkan mempunyai peranan penting didalamnya terutama dalam meningkatkan total pendapatan daerah. Di Kabupaten Tulungagung sumber PAD kabupaten masih relatif sangat kecil, meskipun terjadi kenaikan besarnya realisasi PAD, keadaan ini dapat dilihat dari tabel Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 - 2004 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1 : Realisasi Pendapatan Daerah Dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Miliar Rupiah)				
		2001	2002	2003	2004	Rata-rata
1	Sisa lebih anggaran tahun lalu	14,6374	15,3582	21,7663	8,5409	15,0757
2	Pendapatan asli daerah	11,9289	16,6262	26,2593	26,8948	20,4273
3	Dana perimbangan	245,9801	277,3957	326,0451	342,3069	297,9319
4	Pinjaman pemerintah daerah	0	0	0	0	0
5	Lain-lain penerimaan yang sah	6,2903	18,7004	44,4667	82,5594	38,0042
Jumlah		278,8367	328,0805	418,5373	460,3021	371,4391

Sumber: Dispenda Kabupaten Tulungagung Tahun 2001 – 2004

Tabel 2 : Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004

No	Jenis Penerimaan	Proporsi (%)				
		2001	2002	2003	2004	Rata-rata
1	Sisa lebih anggaran tahun lalu	5,25	4,68	5,20	1,86	4,25
2	Pendapatan Asli daerah	4,28	5,07	6,27	5,84	5,37
3	Dana perimbangan	88,22	84,55	77,90	74,37	81,2
4	Pinjaman pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lain-lain penerimaan yang sah	2,26	5,70	10,62	17,94	9,11
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dispenda Kabupaten Tulungagung tahun 2001 - 2004

Sesuai dengan data tersebut diatas penerimaan PAD tahun anggaran 2001 – 2004 sendiri rata-rata sebesar 20,4273 miliar rupiah dengan proporsi terhadap total penerimaan adalah 5,37%, dan terjadi kenaikan PAD setiap tahunnya. Namun sumber anggaran terbesar tahun anggaran 2001 – 2004 diperoleh dari dana Perimbangan yaitu rata-rata sebesar 297,9319 miliar rupiah dengan proporsi terhadap total penerimaan 81,26%. Maka berdasarkan gambaran tersebut total PAD untuk membiayai total penyelenggaraan daerah hanya sekitar 5,37% saja atau kurang dari 30%.

Pada tahun anggaran 2003 PAD mengalami kenaikan yang mencolok yaitu dari 16,6262 miliar rupiah pada tahun anggaran 2002, menjadi 26,2593 miliar rupiah pada tahun anggaran 2003 atau naik 9,6331 miliar rupiah. Meskipun PAD riil (secara konstan) mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi pada tahun anggaran 2004 proporsi kenaikan PAD terhadap total penerimaan PAD mengalami penurunan yaitu dari 6,27% pada tahun anggaran 2003, menjadi 5,84% pada tahun anggaran 2004 atau turun 0,43%.

Dibawah ini data penerimaan PAD dan rata-rata Pemerintah Kabupaten Tulungagung berdasarkan jenis pungutannya tahun anggaran 2001 - 2004.

Tabel 3 : Realisasi Penerimaan PAD dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004

No	Jenis Pungutan	Jumlah Penerimaan (miliar Rupiah)				
		2001	2002	2003	2004	Rata-rata
1	Pajak Daerah	3,49	5,40	8,09	8,81	6,45
2	Retribusi Daerah	7,41	11,04	14,76	17,94	12,79
3	Laba Usaha Daerah	0,08	0,35	0,01	0,35	0,20
4	Lain-lain PAD yang sah	0,96	1,83	2,79	0,39	1,49
	Jumlah	11,93	18,63	25,64	27,49	20,92

Sumber: Dispenda Kabupaten Tulungagung tahun 2001 - 2004

Tabel 4 : Proporsi Realisasi Penerimaan PAD dan Rata-rata Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 – 2004

No	Jenis Pungutan	Proporsi (%)				
		2001	2002	2003	2004	Rata-rata
1	Pajak Daerah	29,21	29,01	31,54	32,06	30,45
2	Retribusi Daerah	61,15	59,56	57,56	65,26	61,06
3	Laba Usaha Daerah	0,65	1,89	0,02	1,27	0,95
4	Lain-lain PAD yang sah	8,01	9,84	10,88	1,41	7,54
	jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber .. Dispenda Kabupaten Tulungagung tahun 2001 - 2004

Data tersebut menunjukkan bahwa pungutan dari retribusi daerah menduduki peringkat teratas dalam jumlah penerimaan, dengan rata-rata penerimaan 12,7877 miliar rupiah atau dengan proporsi rata-rata 61,06%. Kemudian diikuti dengan pungutan Pajak daerah di peringkat kedua dengan rata-rata penerimaan 6,4465 miliar rupiah atau dengan proporsi rata-rata 30,45%. Kedua pungutan tersebut setiap tahun mengalami kenaikan meskipun tidak diikuti dengan kenaikan proporsi terhadap total PAD setiap tahunnya. Dengan prosentase tersebut diatas pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang lebih dominan terhadap penerimaan PAD, dari pada jenis pungutan lain. Sehingga pajak dan retribusi daerah menjadi fokus penerimaan PAD yang utama tanpa mengesampingkan jenis pungutan yang lain.

Kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut adalah bahwa penerimaan PAD sebesar 5,37%, yaitu kurang dari 30% dimana daerah dikatakan daerah otonom jika PAD minimal 30% dari total penerimaan daerah. Penerimaan PAD juga jauh dibawah dana perimbangan yang mencapai 81,26%.

PAD kabupaten Tulungagung masih relatif sangat kecil, padahal untuk meningkatkan Kemandirian keuangan daerah, maka suatu daerah memerlukan sumber-sumber keuangan yang baik. PAD sebagai sumber pendapatan Pemerintah Daerah yang sangat vital disamping dana perimbangan dari Pusat. Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam pembangunan, apabila daerah memiliki cukup dana terutama dana yang berasal dari penerimaan sumber-sumber PAD. Hal ini disebabkan karena daerah dapat melakukan penataan anggaran yang lebih fleksibel dalam artian sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terutama dalam penggunaan anggaran untuk menunjang Pembangunan perekonomian kerakyatan (Soekarwo, 2003:95).

PAD yang diharapkan mencapai 30% dari total penerimaan daerah pada kenyataannya sangat kecil yaitu sebesar 5,37%. Atas dasar inilah maka penulis tertarik mengkaji dalam studi penelitian dalam mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya setiap penelitian berangkat dari suatu masalah. Masalah tersebut mendorong manusia untuk segera memecahkannya, dengan melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Suatu masalah hendaknya dirumuskan dengan baik dan teratur. Masalah sendiri menurut Surachmad (1992 : 36) memberikan pengertian sebagai berikut : "Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila ingin berjalan terus".

Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memiliki kewenangan penuh harus dapat melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Dalam otonomi daerah peranan PAD akan semakin signifikan, terlebih dalam realisasi konsep kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini, pembatasan masalah difokuskan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang tersebut sebelumnya maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2001 – 2004.
2. Apakah kemampuan keuangan daerah kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2001 - 2004 sudah mandiri

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penerimaan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2001 - 2004
2. Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2001 - 2004.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Memberikan gambaran terhadap kondisi kemandirian keuangan daerah sehingga dapat digunakan sebagai informasi yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi.
2. Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan dari bangku kuliah pada jurusan Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dalam bidang akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi baban referensi dan kajian bagi upaya pengembangan penelitian lebih lanjut, mendalam dan komprehensif sebagai tambahan kajian ilmiah tentang keuangan daerah dimasa yang akan datang.

1.4 Kerangka Teori

Unsur penelitian paling besar peranannya dalam penelitian adalah teori karena dengan teori inilah penelitian mencoba untuk menerangkan fenomena sosial yang menjadi pusat perhatian dalam setiap penelitian. Teori dimaksudkan untuk memberikan landasan-landasan konseptual. Pengertian teori menurut Kerlinger dalam Singarimbun dan Effendi (1995:37) adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Lebih lanjut Kerlinger (Effendi Ed, 1995:37) menyatakan bahwa teori mengandung 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Teori adalah serangkaian Proposisi antar konsep-konsep yang saling berbubungan
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.

3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana hubungannya.

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah diikuti dengan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada hal-hal sebagai berikut: (1) *Sharing of power* atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) *Distribution of Income* atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; (3) Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kemandirian daerah. Jadi Otonomi Daerah menekankan pada kemandirian daerah, dimana adanya *sharing of power* dan *distribution of income* adalah dalam rangka kemandirian pelaksanaan otonomi daerah.

Kemandirian daerah meliputi beberapa variabel. Menurut Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dikutip oleh Marzuki Nyakman dan M. Ryaas Rasyid dalam Widjaya (1992 : 107) tentang variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi, adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan keuangan daerah. Nilainya ditentukan oleh seberapa besar peran PAD terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah.
- b. Kemampuan aparatur. Berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.
- c. Partisipasi masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dasar yang menyangkut kesehatan dan variabel sosial.
- d. Variabel ekonomi di daerah. Dengan mengukur indikator seperti nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir, berapa persentase sektor pertanian, pertambangan, dan penerimaan terhadap PDRB.
- e. Variabel Demografi. Indikasinya berupa pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk yang buta huruf, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang ditamatkan, dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja.

Salah satu ciri utama kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam pelaksanaan otonomi adalah kemandirian dibidang keuangan. Hal ini sesuai dengan dikatakan Pamudji dan syamsi dalam (Kaho, 2001 : 125) yaitu salah satu kriteria dasar atau indikator untuk mengetahui

secara nyata kemampuan dasar dalam mengukur kemampuan mengatur rumah tangganya sendiri adalah *Self-Supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor *essensial* dalam mengukur tingkat (kemandirian) daerah dalam melaksanakan otonominya. Jadi kemandirian keuangan adalah aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.

Realisasi pelaksanaan *Sharing of power* adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Sedangkan realisasi dari pelaksanaan *Distribution of Income* adalah adanya desentralisasi fiscal. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka perlu adanya perimbangan antara pusat dan daerah. Dan yang menjadi perwujudan dari Desentralisasi fiscal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercantum dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Syarat agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah bila daerah tersebut mempunyai prosentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, minimal sebesar 30% (Widjaya, 1992:41).

Dengan PAD sebesar lebih dari 30% dari total penerimaan daerah mengindikasikan daerah setidaknya dapat membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan pemerintahan. Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari peran pemerintah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan,
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
3. Pelayanan publik (Syarifudin, 2001 : 1).

Menurut Santoso (1995 : 20) meskipun PAD tidak harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi "derajat kemandirian / kemampuan keuangan suatu daerah, sering juga disebut sebagai kemandirian fiscal". Syarat suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah apabila daerah tersebut mempunyai prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah minimal 30% (Widjaya, 1992 : 41).

Maka Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi kemandirian atau kemampuan suatu daerah yang sering disebut kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian tersebut maka yang menjadi teori dan konsep untuk menerangkan masalah diatas adalah :

1.4.1 Otonomi Daerah

Tujuan memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan yang semakin demokratis, dan keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah agar daerah mampu bersaing di era globalisasi.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan yang diberikan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat penerapannya pada daerah kabupaten dan kota.

Otonomi daerah berarti penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tentang otonomi daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada hal-hal sebagai berikut: (1) *Sharing of power* atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) *Distribution of Income* atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; (3) Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kemandirian daerah. Untuk lebih jelasnya ketiganya akan diuraikan sebagai berikut :

A. Sharing of power

Sharing of power adalah pembagian kekuasaan, dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah pembagian tersebut merupakan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka diikuti oleh pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah yang disebut dengan desentralisasi. Jadi desentralisasi merupakan mekanisme untuk melaksanakan *sharing of power*.

Di negara berkembang untuk menuju proses keberhasilan desentralisasi, maka dipertegas dengan pemberlakuan persyaratan-persyaratan yang ketat. Secara khusus perlu diwaspadai bahwa desentralisasi bila gagal memperbaiki pelayanan daerah dan juga dapat mengganggu stabilitas Nasional.

Perubahan UU No 22 tahun 1999 menjadi UU No 32 tahun 2004 mempengaruhi gambaran Desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia yang merupakan cerminan kebijakan keuangan yang diambil oleh pusat. Terlihat dari pertimbangan yang melatarbelakangi kedua Undang-undang tersebut, dimana pada UU No 22 tahun 1999 lebih menekankan pada prinsip demokrasi, Otonomi daerah seluas luasnya dan peran serta masyarakat. Sedangkan pada UU No 32 Tahun 2004 pertimbangan lebih menekankan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pemerataan, dan keadilan ; serta memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih memeberikan kontrol yang kuat kepada daerah. Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang berarti Undang-undang tersebut relatif lebih sentralistik. Jadi perubahan undang-undang dari UU No 22 tahun 1999 menjadi UU No 32 tahun 2004 merupakan proses resentralistik yang merupakan cerminan adanya kepentingan Politik yang melatarbelakanginya.

Kebijakan Desentralisasi fiskal yang merupakan perwujudan dari otonomi daerah selain bertujuan ekonomis, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka politik. Artinya bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya untuk memperbaiki pelayanan daerah, tetapi sekaligus menjaga stabilitas nasional.

Ini sesuai dengan pendapat Bahl dalam (Bird, 2000 : 6) bahwa reformasi perpajakan dan perimbangan Keuangan pusat dan daerah akhir-akhir ini bertujuan untuk :

- a. Menegaskan kembali kontrol makroekonomi
- b. Menjamin sumber-sumber yang cukup dari pusat untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Mengingat stabilitas nasional (ekonomi dan politik) merupakan bagian dari tugas pemerintah, maka penting sekali bagi pusat untuk memiliki semua peralatan kebijakan yang dibutuhkan (Bird, 2000 : 8). Pendapat ini dipegang banyak Negara termasuk Indonesia sehingga menimbulkan berbagai macam batasan diantaranya :

1. Batasan pinjaman untuk proyek investasi jangka panjang.
2. Batasan jumlah kewajiban jatuh tempo.
3. Batasan Persentase maksimum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Perlunya persetujuan pusat dalam melakukan pinjaman dan lain-lain.

Salah satu batasan fiskal tersebut adalah batasan maksimum PAD, artinya ada usaha untuk membatasi peningkatan PAD yang diterima daerah. Jadi lepas dari teori bahwa peningkatan PAD merupakan indikasi kemandirian keuangan daerah, stabilitas Nasional (politik) harus menjadi prioritas utama.

Masih menurut Bird pada Negara kebhinekaan yang tinggi (Indonesia) derajat Otonomi Daerah mencuat dalam pelaksanaan sebagai media untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik, walaupun dalam struktur konstitusional formalnya adalah Negara kesatuan. Jadi Otonomi Daerah cenderung digunakan untuk mempertahankan stabilitas politik dengan perhatian utama pada rancangan hubungan Fiskal (desentralisasi fiskal) antara pemerintah pusat dan daerah, apakah memberikan kontribusi terhadap stabilitas politik.

Seperti pada transfer dana perimbangan yang merupakan bagian dari desentralisasi fiskal, bahwa dana perimbangan digunakan untuk menghambat pertumbuhan (PAD) banyak daerah yang memiliki latar belakang politis kurang bersahabat. Atau memanfaatkan dana perimbangan sebagai salah satu wacana memelihara keseimbangan politis di berbagai daerah.



B. Distribution of Income

Distribusi of Income merupakan pendistribusian keuangan, dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah pendistribusian tersebut merupakan pendistribusian keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan *Ditribution of Income* adalah dengan mekanisme desentralisasi Fiskal. Persoalan utama desentralisasi Fiskal adalah berkaitan dengan alokasi sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah. Jadi *distribution of income* diwujudkan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

Makna dari *Distribution of income* yang dilaksanakan dalam desentralisasi fiskal adalah dalam bentuk pemberian otonomi dibidang keuangan kepada daerah

C. Pelaksanaan Otonomi dalam rangka kemandirian daerah

Otonomi Daerah menekankan pada kemandirian daerah, dimana adanya *searing of power* dan *distribution of income* adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian daerah meliputi beberapa variabel. Menurut Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dikutip oleh Marzuki Nyakman dan M. Ryaas Rasyid dalam Widjaya (1992 : 107) tentang variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk berotonomi, adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan keuangan daerah. Nilainya ditentukan oleh seberapa besar peran PAD terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah.
- b. Kemampuan aparatur. Berapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.
- c. Partisipasi masyarakat. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dasar yang menyangkut kesehatan dan variabel sosial.
- d. Variabel ekonomi di daerah. Dengan mengukur indikator seperti nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir, berapa persentase sektor pertanian, pertambangan, dan penerimaan terhadap PDRB.
- e. Variabel Demografi. Indikasinya berupa pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk yang buta huruf, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang ditamatkan, dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja.

1.4.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih (2003 : 40) Desentralisasi adalah pendistribusian atau pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih rendah yaitu pemerintah daerah, sehingga daerah bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.

Sedangkan menurut UU No 33 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dalam pelaksanaan Otonomi daerah memiliki empat elemen yaitu : Desentralisasi politik; Desentralisasi fiskal; Desentralisasi Administratif; Desentralisasi Ekonomi (Cheema dan Rondinelli dalam Wulandari, 2001 : 18 dalam Rohman, 2003 : 14). Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian adalah Desentralisasi Fiskal yang merupakan komponen utama dalam desentralisasi.

Maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam melakukan pembiayaan daerah. Kewenangan dalam pembiayaan daerah disebut juga dengan kewenangan di bidang Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah

Menurut P.H. van der Kemp (dalam M. Hadi, 1981 : 2) pengertian keuangan daerah

Adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Hak-hak yang dapat dinilai dengan uang tersebut misalnya :

- a. Hak mengenakan pajak kepada warganya, yang pungutannya sekedar perlu berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang dikenakan pajak itu dan dengan pajak itu negara memperoleh penerimaan untuk membiayai tugasnya.
- b. Negara dapat mencetak uang kertas maupun uang logam, pengadaan alat-alat pembayaran yang sah, yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan oleh bank sentral (Bank Indonesia).

c. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warganya.

Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang misalnya :

- a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat. Misalnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, penyuluhan dibidang pertanian, dan lain-lain.
- b. Kewajiban membayar atas hak-hak tagihan dari pemborong bangunan bangunan atas dasar surat perjanjian antara instansi pemerintah dengan pihak pemborong setelah barang /bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

Keuangan daerah menyangkut upaya mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang muncul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan itu digali dan didistribusikan. Gambaran mengenai bentuk perwujudan keuangan daerah sebagai sub sistem keuangan negara tercermin dalam APBD setiap tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, APBD merupakan suatu bentuk perwujudan keuangan daerah sebagai sub sistem dari keuangan negara. Dengan kata lain gambaran mengenai keuangan daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun anggaran baik propinsi maupun tingkat kabupaten / kota. Dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- c. Dana Perimbangan
 1. Dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam
 2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Sumber penerimaan daerah dalam APBD dirinci menjadi :

1. Sisa anggaran Tahun sebelumnya
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Dana perimbangan
4. Pinjaman daerah
5. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Sedangkan bagian pengeluaran terdiri dari :

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran yang digunakan untuk memelihara atau menyelenggarakan Operasional pemerintahan sehari-hari. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran hutang, ganjaran atau subsidi atau sumbangan kepada bawahan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran lain yang tidak disangka.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran yang selama ini digunakan untuk membiayai proses pembangunan, kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Salah satu sumber penerimaan APBD adalah sumbangan / bantuan (Grant). Sumbangan / subsidi dan pemerintah pusat sesungguhnya hanya merupakan instrumen yang dapat diharapkan memacu atau mendorong (stimulation) peningkatan PAD dan bukan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan PAD dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan. Sesuai dengan penekanan Nurjaman Arsyad (dalam Radianto 1997 : 44) bahwa hakikat bantuan subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah.

1.4.3 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi maka perlu adanya Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah Serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan fungsi tugas pembantuan.

Menurut Juliantara (2000 : 268), dampak positif perimbangan keuangan pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong hal - hal sebagai berikut:

- a. Daerah lebih mampu memacu pembangunan daerahnya
- b. Meningkatkan pembangunan daerah yang seimbang
- c. Pemberian dana yang rasional dan adil kepada daerah penghasil sumber utama penerimaan negara
- d. Pemerataan pembangunan
- e. Mengurangi kesenjangan sosial
- f. Meredam ketidakpastian daerah
- g. Meningkatkan aspek daerah terhadap pusat
- h. Memperkuat integritas nasional

Jadi yang menjadi tujuan utama hubungan ini adalah tercapainya perimbangan agar potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Sehingga adanya hak dalam mengambil keputusan dan mengenal anggaran belanja bagi pemerintah daerah, bagaimana memperoleh dan membelanjakannya yang merupakan urusan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan pendekatan berikut :

- a. Pendekatan Kapitalis (Capitalization Approach)
Hubungan didasarkan pada "Kuasi Komersial" dimana pemerintah pusat memberi investasi kepada daerah dan daerah mengelolanya dengan keuntungan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Pendekatan Sumber Pendapatan (Expenditures Approach)
Hubungan didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan biaya - biaya untuk proyek atau untuk pembiayaan pembuatan gedung pemerintah daerah
- c. Pendekatan Komprehensif (Comprehensif Approach)
Hubungan didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber - sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran -

pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber - sumber pendapatan dan target belanja (Davey dalam Ibnu Syamsi 1994:224).

Pada dasarnya hubungan keuangan antara pusat dan daerah menyangkut pembagian dana. Hubungan ini adalah suatu pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan tertentu. Pembagian tanggung jawab ini juga mengisyaratkan adanya pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran yang ada akibat kegiatan tersebut (Davey, 1998:179). Pembagian dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang disebut dengan dana perimbangan. Jadi dana perimbangan sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Penerimaan negara dari PBB 10% pusat, 16,2% propinsi dan 64,8% daerah, dari BPHTB 20% pusat, 16% propinsi dan 64% daerah , dari sumber daya alam: kehutanan dari IHPH dan PSDH 20% pusat dan 80% daerah, kehutanan reboisasi 60% pusat dan 40% daerah, Pertambangan umum 20% pusat dan 80% daerah, perikanan 20% pusat dan 80% daerah, minyak bumi 84,5% pusat dan 15,5% daerah, gas bumi 69,5% pusat dan 30,5% daerah, panas bumi 20% pusat dan 80% daerah
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) atau *Block Grant* ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. DAU untuk daerah propinsi dan Kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara propinsi dan kabupatere/kota.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *Special Grant* ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

1.4.4 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan perwujudan dari Desentralisasi fiskal. Dimana untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan perlu pendanaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 3 bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan PAD adalah pendapatan Daerah yang asli dari daerah dan dipungut oleh daerah.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mac Andrews (1995 : 118 dalam Rohman, 2003 : 21) mengartikan PAD sebagai proporsi pendapatan propinsi dan kabupaten yang dapat diperoleh dan sumber-sumber diluar dari pemerintah di atasnya.

Menurut Widjaya (1992 : 42) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapat dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Selama ini kontribusi PAD dalam total penerimaan daerah relatif masih kecil. Prosentase terbesar dalam penerimaan daerah masih terdapat pada sumbangan dari pemerintah pusat. Struktur penerimaan daerah yang demikian tersebut belum mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan - kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Prinsip otonomi daerah yang lebih menekankan pada pengelolaan daerah secara mandiri harus menempatkan PAD pada posisi yang sangat strategis dalam stuktur penerimaan daerah. Fakta memperlihatkan belum dioptimalkannya PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang utama.

Menurut Mahi (2000 : 58 dalam Rohman 2003 : 20). sebab-sebab PAD belum dimanfaatkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
- b. Berdasar UU No. 18 Th 1997 beberapa pajak / retribusi yang ditetapkan untuk daerah memiliki basis pungutan yang relatif kecil, dari sifatnya bervariasi antar daerah. Sempitnya basis pajak berarti memperkecil

- manuver keuangan daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi seperti krisis ekonomi.
- c. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan subsidi ini mempengaruhi "usaha" daerah dalam memungut PAD-nya dan lebih mengandalkan kemampuan "negosiasi" daerah terhadap pusat untuk mendapatkan tambahan bantuan.
 - d. Kemampuan administrasi pemungutan daerah yang masih rendah yang mengakibatkan pungutan pajak masih dibebani biaya pemungutan yang besar.
 - e. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah sehingga penerimaan daerah mengalami kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Perlu adanya pengelolaan dan pengembangan sumber daya keuangan bagi peningkatan PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa optimalisasi PAD pelaksanaan otonomi daerah akan sulit dilaksanakan. Tetapi perlu diingat bahwa inisiatif harus datang dari masyarakat lokal yang sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan dari pemerintah daerah (Saragih 2000 : 55). Dengan kata lain selama PAD benar-benar tidak memberatkan dan membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing tentu tidak masalah, dan dapat dikatakan daerah dengan PAD yang semakin meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dari pusat.

Sedangkan syarat agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah bila daerah tersebut mempunyai prosentase kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, minimal sebesar 30% (Widjaya, 1992:41).

Dengan PAD sebesar lebih dari 30% dari total penerimaan daerah mengindikasikan daerah setidaknya dapat membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan pemerintahan. Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari peran pemerintah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan,
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan
3. Pelayanan publik (Syarifudin, 2001 : 1).

Komponen-komponen PAD adalah sebagai berikut:

a. *Hasil pajak daerah*

Pajak daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jenis pajak Daerah Tingkat II terdiri dari : Pajak hotel dan restoran Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C; dan Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. *Hasil retribusi daerah*

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut UU No 34 Tahun 2000 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan.

Retribusi daerah merupakan sektor sumber utama, tingginya pendapatan daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi dapat dipungut (Kaho 1997 : 158). Lebih lanjut oleh Redjo (1995 : 17) pada prinsipnya kemanfaatan dalam penarikan retribusi, maka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang/ jasa tidak harus membayar. Sebaliknya mereka yang membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

Retribusi terbagi dalam 3 golongan :

1. Retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
3. Retribusi perijinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

c. *Laba Usaha Daerah*

Usaha daerah disebut juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Posisi perusahaan Daerah (BUMD) di era otonomi sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sekarang ini BUMD tidak bisa lagi dianggap sebagai sapi perahan oleh pejabat pemerintah daerah dan anggota DPRD. Semua pengelolaan BUMD haruslah transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi masyarakat lokal baik langsung maupun tidak langsung.

d. *Lain-Lain PAD yang Sah*, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. jasa giro
3. pendapatan bunga
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komis, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

1.4.5 Konsep Kemandirian Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah ditekankan pada tiga hal berikut ini, yaitu : (1) *Sharing of power* atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; (2) *Distribution of Income* atau perimbangan keuangan antara pusat dan daerah; (3) Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka kemandirian daerah. Jadi Otonomi Daerah menekankan pada kemandirian daerah, dimana adanya *sharing of power* dan *distribution of income* adalah dalam rangka kemandirian pelaksanaan otonomi daerah.

Ada beberapa variabel untuk mengukur kemandirian, menurut Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang dikutip oleh Marzuki Nyakman dan M. Ryaas Rasyid dalam Widjaya (1992: 107). Dari beberapa variable

tersebut yang paling jelas dan menonjol untuk mengukur kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah mampu berotonomi adalah faktor kemampuan keuangan dengan tanpa mengesampingkan faktor lain.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Pamudji dan Syamsi dalam Kaho, 2001 : 125). Salah satu kriteria dasar atau indikator untuk mengetahui secara nyata kemampuan dasar dalam mengukur kemampuan mengatur rumah tangganya sendiri adalah *Self-Supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor *essential* dalam mengukur tingkat (kemandirian) daerah dalam melaksanakan otonominya.

Menurut Bjorn Hettne (2001 ; 309) kemandirian berarti percaya pada diri sendiri, terutama mengandalkan sumberdaya sendiri baik sumber daya manusia, maupun sumber daya alam, dan kemampuan mencapai tujuan sendiri serta kemampuan mengambil keputusan yang otonom, ia tidak tergantung pada pengaruh dan kekuatan luar yang dapat berubah menjadi tekanan. Dari pengertian desentralisasi fiskal, maka fiskal dapat diartikan sebagai pembiayaan pembangunan daerah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan daerah.

Jadi kemandirian keuangan berarti tidak tergantung dengan pusat, dan dengan kekuatan sendiri dalam pembiayaan daerah (bidang keuangan). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Kemandirian Fiskal (keuangan) daerah adalah suatu keadaan dimana daerah tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat dengan dana perimbangannya, dan lebih mengutamakan PAD sebagai pencerminan kekuatan daerah sendiri. Dengan kata lain Kemandirian Keuangan Daerah berarti Otonom dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian fiskal daerah tidak akan menjadi kenyataan kalau pusat menguasai sebagian besar dana, sebaliknya yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat, maka dipandang perlu mendorong pemerintah daerah agar lebih keras berupaya meningkatkan pendapatan. (Booth, 1993 : 132 dalam Rohman, 2003 : 27). Jadi pemerintah daerah akan menikmati tingkat otonomi yang dikehendaki yaitu kebebasan bertindak dalam membelanjakan anggarannya baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunannya yang tergambar dalam APBD, jika mereka sendiri mencari

sebagian besar uang yang mereka perlukan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri mengelola dan menggunakan sendiri, cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan terhadap pemerintahan pusat harus seminim mungkin, PAD harus menjadi bagian utama sumber keuangan daerah yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan regional (Soernata, 2000 : 5).

Menurut Santoso (1995 : 20) meskipun PAD tidak harus dapat membiayai seluruh anggaran belanja daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi "derajat kemandirian / kemampuan keuangan suatu daerah, sering juga disebut sebagai kemandirian fiskal". Syarat suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah apabila daerah tersebut mempunyai prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah minimal 30% (Widjaya, 1992 : 41). Dengan PAD sebesar lebih dari 30% dari total penerimaan daerah mengindikasikan daerah setidaknya dapat membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan pemerintahan. Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari peran pemerintah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan Pelayanan publik (Syarifudin, 2001 : 1).

Sejalan dengan pendapat Santoso dan Widjaya menurut Wulandari (2001 : 21 dalam Rohman, 2003 : 28) Kemandirian Fiskal dapat dipelajari dan diukur dengan melihat pada besarnya derajat desentralisasi fiskal dari suatu daerah. Menurut Kuncoro (1995 :8) yang menyatakan bahwa indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah bukan berarti setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluarannya (rutin maupun pembangunan) dari PAD, namun kemandirian daerah dalam pembiayaan setidaknya pengeluaran rutin dengan PAD tetap merupakan suatu usaha yang harus ditingkatkan. Ditinjau dari sudut kebijakan dalam penggunaan dana PAD merupakan sumber pembangunan yang paling memberikan otonomi kepada daerah (Pontiowinoto, 1991 : 33 Dalam Soemarsono, 2000: 86).

Kemampuan daerah dalam memobilisasi dana dapat diukur melalui peran PAD dalam membiayai pengeluaran rutin, besarnya rasio PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam presentase pada tahun yang sama atau yang sering disebut IKR (Esmara, 1986 :222). Dengan kata lain indikator kemandirian dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin Daerah.

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil. Dapat memungut berbagai sumber pendapatan daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus cukup memadai dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan serta berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari. Serta harus cukup elastis terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Sehingga semakin besar PAD kemampuan otonomi fiskal daerah meningkat dan dapat melaksanakan program pembangunan lebih baik (Sumarsono, 2000 : 1).

1.5 Hipotesis

Pengertian hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara yang merupakan suatu rumusan yang menyatakan harapan dari penulis tentang hubungan dua variabel dimana akan memberikan suatu kepastian terhadap dasar pemikiran yang telah dituangkan.

Adapun pengertian dari hipotesis menurut Sugiono (1995 : 51) adalah sebagai berikut :

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta yang empiris

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian.

Maka pernyataan sementara atas masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan PAD di Kabupaten Tulungagung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung.

Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

- a. Hipotesis Nol (H_0) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung.
 - b. Hipotesis Kerja (H_1) : Terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2001 - 2004 sudah mandiri.

Secara statistik hipotesis tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

- a. Hipotesis Nol (H_0) : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah Tahun anggaran 2001- 2004 belum mandiri.
- b. Hipotesis Kerja (H_1) : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah Tahun anggaran 2001 -2004 sudah mandiri

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksud untuk mempermudah dalam pengukuran masing-masing variabel dalam indikator-indikator. Tetapi sebelum penulis mengemukakan definisi operasional yang terkandung dalam penelitian ini perlu kiranya untuk memberikan suatu pengertian atau batasan dari definisi operasional tersebut. Menurut Kerlinger dalam Singarimbun dan Effendi (1989 : 46) definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang

sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Jadi dengan informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana pengukuran atas variabel tersebut dilakukan.

Dari pengertian diatas maka definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengaruh PAD terhadap keindirian keuangan daerah

Maka variabel yang akan ditarik dari penjabaran konsep diatas adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable) / (x) adalah PAD

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diukur dalam satuan moneter (rupiah) perkwartal.

2. Variabel terikat (Dependent Variable) / (y) adalah Kemandirian keuangan daerah.

Yaitu Kemandirian Keuangan Daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang dinyatakan dengan derajat desentralisasi fiskal, dimana indikator derajat desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah, dalam satuan moneter (rupiah) perkwartal.

b. Kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Mengetahui kemandirian keuangan daerah yang diperoleh dari besarnya peran PAD. Untuk mengukurnya digunakan indikator sebagai berikut:

1. Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah

Diukur dengan menggunakan Rasio antara PAD dengan total Total Penerimaan Daerah dalam satuan moneter (rupiah) perkwartal.

2. IKR (Indek Kemampuan Rutin)

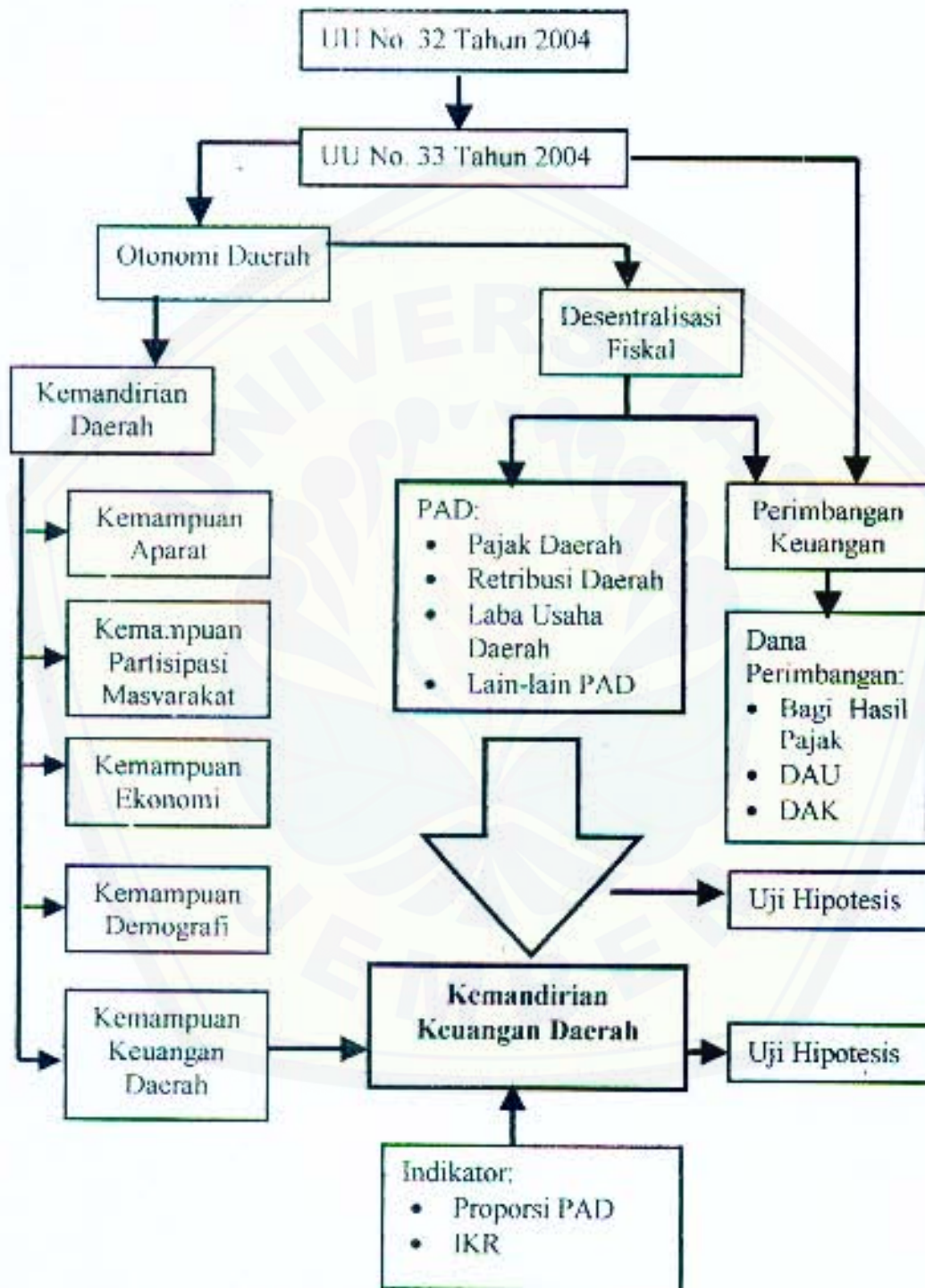
Adalah menunjukkan kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin. Diukur dengan menggunakan rasio antara PAD dengan pengeluaran rutin daerah dalam satuan moneter (rupiah) perkwartal.

1.7 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari konsep yang disederhanakan, dimaksudkan agar penelitian mudah digambarkan secara menyeluruh (Holistik) tentang kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dan proporsi PAD.



Gambar 1 Model Penelitian “ Pengruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”



Keterangan : Kerangka berfikir Penelitian

1.8 Metode Penelitian

Hasil dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah apabila mempergunakan suatu metode penelitian secara ilmiah dan benar. Metode Penelitian akan dipakai untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengalaman. Metode dapat pula digunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.

Menurut Sugiono (1999 : 1), "Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1990 : 16) yang dimaksud metode adalah : "Jalan atau cara schubungan dengan upaya ilmiah maka metode ini menyangkut cara untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan."

Dengan demikian metode penelitian adalah cara kerja ilmiah yang harus ditempuh dan digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Adapun metode penelitian meliputi:

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *eksplanatif*, dengan pendekatan kuantitatif. Dimana menurut Sugiono (1999 : 10) penelitian eksplanatif adalah "penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain".

1.8.2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah berupa laporan keuangan bulanan, tentang perkembangan PAD, Penerimaan Daerah dan APBD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan periode yang dipilih menjadi obyek penelitian adalah selama runtut waktu (*time series*) empat tahun terakhir, tahun 2001 – 2004 dengan periode kuartal (tiga bulanan). Pemilihan periodisasi waktu tersebut dengan pertimbangan: *pertama* faktor keterbatasan dana, *kedua* berdasarkan pada kenyataan bahwa semakin berkembangnya pembangunan

Tulungagung, sehingga dana dalam PAD secara khusus dan APBD secara umum semakin penting perannya dalam estimasi kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada beberapa data keuangan daerah berupa laporan tahunan, yaitu :

- a. Perkembangan data keuangan bulanan total pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung dalam runtut waktu tahun 2001 - 2004.
- b. Perkembangan data keuangan bulanan hasil penerimaan PAD beserta sumber-sumbernya Kabupaten Tulungagung dalam runtut waktu tahun 2001 - 2004.
- c. Perkembangan data keuangan tahunan tentang APBD daerah Kabupaten Tulungagung dalam runtut waktu tahun 2001 - 2004.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung, wilayah Propinsi Jawa Timur, Data dapat diperoleh dan tercatat diberbagai instansi terkait di wilayah Kabupaten Tulungagung seperti kantor Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekwilda, dan BPS.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung dengan pertimbangan bahwa:

- a. Lokasi tersebut dipahami oleh peneliti
- b. Penelitian akan mudah memperoleh data yang diperlukan.
- c. Pemerintahan daerah Kabupaten Tulungagung menarik untuk diteliti karena daerahnya yang tidak terlalu luas.

1.8.4 Tehnik Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara, (Sugiono, 1999 : 12). Pengumpulan data memerlukan suatu tehnik untuk memperoleh data yang akurat dan reliabel untuk mendukung

keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Library Reasearch* / Study Pustaka

Data dikumpulkan melalui literatur yang berkaitan dengan bahasan pada penelitian. Literatur ini berupa buku, jurnal, majalah, dan juga dokumen dokumen serta dari media internet yang dapat mendukung untuk pembahasan penelitian

b. *Field Reasearch* / Dokumentasi

Data dikumpulkan dengan mendatangi sumber data langsung yang berupa data skunder tentang laporan keuangan bulanan daerah runtut waktu tahun 2001 - 2004 diberbagai instansi terkait di wilayah Kabupaten Tulungagung seperti kantor Dinas pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Daerah, Dan BPS.

1.8 5 Tehnik Analisis Data dan Uji Hipotesis

A. Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Untuk mengukur Kemandirian Keuangan suatu daerah yang disebut dengan derajat desentralisasi fiskal daerah (Kuncoro, 1995 : 8).

$$DDFD = \frac{PAD}{TPD}$$

$$TPD = PAD + BHBP + SB$$

Dimana:

DDFD : Derajat desentralisasi Keuangan Daerah

PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BHBP : Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

BG : Block Grant dari Transfer Pusat

TPD : Total Penerimaan Daerah

B. Analisis Regresi Sederhana

Untuk memprediksi nilai suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah dua variabel mempunyai hubungan atau tidak (Gujarati 1997 : 49)

$$Y = \alpha + \beta X_i + e_i$$

Dimana :

Y : variabel terikat

X : variabel bebas

α : konstanta

β : koefisien regresi linear

e : variabel pengganggu

C. Analisis Proporsi

Untuk mengetahui Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah yang dirumuskan sebagai berikut (Widjaya, 1992 : 42)

$$P_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$$

Dimana:

P_i : proporsi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah

X_i : PAD

Y_i : total penerimaan daerah

Kriteria

P_i > 30,00% artinya otonomi disebut nyata dan bertanggung jawab

P_i < 30,00% artinya otonomi belum dikatakan nyata dan bertanggung jawab.

D. Analisis IKR

Untuk mengetahui kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dirumuskan sebagai berikut (Esmara, 1985 : 226)

$$IKR = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah pengeluaran rutin}} \cdot 100\%$$

Kriteria :

IKR > 100% artinya pengeluaran daerah telah mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dan PAD nya

IKR < 100% artinya pengeluaran daerah belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dengan PAD nya

E. Analisis Perubahan

Untuk menghitung besarnya pertumbuhan PAD, sumber-sumber PAD, dan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Digunakan rumus metode tahunan yang dirumuskan (Widodo, 1990 : 36 dalam Sumarsono, 2000:40) :

$$TPI = \frac{TVit - TVit - i}{TVit - i} \times 100\%$$

Dimana:

TPI : Tingkat pertumbuhan variabel i

TVit : Total variabel i tahun tertentu

TVit-i : Total variabel i tahun sebelumnya

F. Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel bebas (PAD) terhadap variabel terikat (Kemandirian keuangan daerah) secara parsial maka digunakan Uji t dengan rumus (Soelistyo, 1987: 24)

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana :

β_i : koefisien regresi

$S\beta_i$: standart hipotesis

Perumusan Hipotesis I :

Hipotesis Nol (H_0) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Hipotesis Kerja (H_1) : Terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung.

Kriteria Pengujian :

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika Probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara

PAD dengan Kemandirian keuangan daerah,

Jika Probabilitas $\alpha < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, berarti ada pengaruh nyata antara PAD dengan Kemandirian keuangan daerah

Perumusan Hipotesis II

$H_0 = P \leq 0,30$ artinya Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 – 2004 belum mandiri.

$H_1 = P > 0,30$ artinya kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 - 2004 telah mandiri.

Kriteria Pengujian :

H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

G. Uji asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan gambar normal probabiliti Plot. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai titik-titik pada nilai distribusi data akan terletak atau berada disekitar garis lurus.

Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya. Jika ada terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Haque dan Reitsch, 1998: 360) dalam Mudrajad (2001: 106). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini sering kali ditemukan apabila menggunakan data runtut waktu.

Menurut Gujarati (1993:217) sebagai aturan praktis melalui uji *durbin watson*, adanya autokorelasi positif digunakan formulasi sebagai berikut:

$d < d_L$ \Rightarrow terjadi serial korelasi positif

$d < d_U$ \Rightarrow tidak terjadi serial korelasi positif

$d_L \leq d \leq d_U$ \Rightarrow pengujian tidak menyakinkan

Dimana:

d = nilai durbin watson

d_L = nilai durbin watson tabel (batas bawah)

d_U = nilai durbin watson tabel (batas atas)

Menurut Theil dan Nagar (1971:201) dalam Gujarati (1993:217) bahwa batas atas d_U "kira-kira sama dengan batas signifikan sebenarnya dalam semua kasus dimana perilaku dari variabel yang menjelaskan adalah halus (*smooth*) dalam arti bahwa perbedaan pertama dan kedua kecil dibandingkan dengan jangkauan (*range*) dari variabel yang bersangkutan itu sendiri".

Sedangkan untuk mendeteksi adanya autokorelasi negatif digunakan formulasi sebagai berikut :

$d > 4 - d_L$ \Rightarrow terjadi serial korelasi negatif

$d < 4 - d_U$ \Rightarrow tidak terjadi serial korelasi negatif

$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$ \Rightarrow pengujian tidak menyakinkan

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi yaitu dengan melihat grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan X adalah residual yang telah distudentized.

Dasar analisis :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

H. Koefisien determinasi

Untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui berdasarkan koefisien determinasi berganda (Supranto, 1955 : 102)

$$R^2 = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2 \sum Y_i^2}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien Determinasi

i : Banyaknya variabel

Kriteria pengujian :

1. Apabila nilai R^2 mendekati 0 maka tidak ada pengaruh antara , variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Apabila nilai R^2 mendekati 1 maka pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat adalah besar.

BAB II

DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran mengenai daerah, tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dengan memaparkan diskripsi lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan serta informasi guna memahami keadaan senyatanya mengenai daerah penelitian sehingga mampu menambah pengertian, wawasan dan kemudahan dalam penjabaran. Sehingga dengan diskripsi ini dapat membantu peneliti dalam mengetahui sekaligus dapat memahami situasi, kondisi, serta berbagai masalah yang dihadapi berikut dengan alternatif pemecahannya. Jadi mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang terkait dan mendukung dalam penelitian ini.

Daerah yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian ini adalah daerah Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur.

Gambaran tentang daerah penelitian dapat diperoleh melalui pengamatan dan observasi data-data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait langsung dengan obyek penelitian. Gambaran tentang daerah penelitian terdiri atas gambaran : Letak Geografis, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri, perdagangan, perhubungan, keuangan, dan pendapatan regional. Untuk lebih jelasnya akan penulis terangkan sebagai berikut

2.2 Letak Geografis

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 1.150,41 Km² dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut kurang dari 500 m, yaitu terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112° 07' bujur timur dan 7° 51' sampai dengan 8° 18' lintang selatan. Berbentuk daratan yang subur pada bagian Utara, Tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan. Batas Administrasi Kabupaten Tulungagung adalah di sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan

Kabupaten Blitar, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Dari 19 kecamatan diatas, paling luas daerahnya adalah Kecamatan Sendang dengan luas 121,56 Km², diikuti dengan Kecamatan Tanggunggunung dengan luas 114,73 Km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Tulungagung dengan luas hanya 10,83 Km². Dari kesembilan belas kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, 17 kecamatan memiliki ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut. Sedangkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pagerwojo dan Sendang ketinggian rata-ratanya lebih dari 500 m dari permukaan laut, bahkan di beberapa desa ketinggiannya lebih dari 700 m dari permukaan laut.

Hari hujan di Kabupaten Tulungagung terbesar ada di bulan Februari, dan terkecil ada di bulan Oktober. Sedangkan curah hujan terbesar ada di bulan Desember dan terendah ada di bulan Agustus. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2004 adalah 140 Mm. Curah hujan dan hari hujan tidak merata antar waktu dan antar daerah, sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang saling bertentangan, misalnya terjadi banjir di suatu daerah sementara di daerah lain terjadi kekeringan pada suatu saat. Dengan curah hujan diatas maka hampir semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung dialiri sungai, kecuali kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Tulungagung kurang lebih ada 27 sungai.

2.3 Pemerintahan

Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka peran Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi Pemerintah daerah yang bersangkutan.

**Tabel 5 : Desa / Kelurahan, Dusun, RT, Dan RW
Menurut Kecamatan Tahun 2004**

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Besuki	10	20	44	224
2	Bandung	18	43	95	320
3	Pakel	19	42	94	311
4	Campurdarat	9	28	74	332
5	Tanggunggunung	7	37	75	160
6	Kalidawir	17	54	125	413
7	Pucanglaban	9	24	44	162
8	Rejotangan	16	40	148	500
9	Ngunut	18	36	148	459
10	Sumbergempol	17	44	126	384
11	Boyolangu	17	43	106	441
12	Tulungagung	14	-	89	299
13	Kedungwaru	19	49	122	471
14	Ngantru	13	43	112	342
15	Karangrejo	13	39	79	266
16	Kauman	13	33	89	323
17	Gondang	20	50	100	388
18	Pagerwojo	11	37	64	188
19	Sendang	11	53	96	256
	Jumlah	271	715	1830	6239

Sumber : Bagian Pemerintahan Setkab Tulungagung

Unit Pemerintahan Daerah di bawah Kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam desa/kelurahan. Kabupaten Tulungagung Terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1830 Rukun Warga (RW), 6239 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkanyang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Berdasarkan Inmendagri 8 tahun 1996 tentang juklak Kepmendagri 25 tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Klasifikasi desa/kelurahan di Tulungagung tidak lagi pada tingkatan swasembada melainkan pada tingkat swadaya sebanyak 140 desa/kelurahan dan swakarsa sebanyak 131 desa/kelurahan.

**Tabel 6 : Banyak Desa / Kelurahan dan Klasifikasinya
menurut Kecamatan Tahun 2004**

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1	Besuki	1	9	-
2	Bandung	18	-	-
3	Pakel	5	14	-
4	Campurdarat	6	3	-
5	Tanggunggunung	7	-	-
6	Kalidawir	4	13	-
7	Pucanglaban	9	-	-
8	Rejotangan	1	15	-
9	Ngunut	18	-	-
10	Sumbergempol	-	17	-
11	Boyolangu	16	1	-
12	Tulungagung	8	6	-
13	Kedungwaru	-	19	-
14	Ngantru	8	5	-
15	Karangrejo	11	2	-
16	Kauman	-	13	-
17	Gondang	6	14	-
18	Pagerwojo	11	-	-
19	Sendang	11	-	-
Jumlah		140	131	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Pada pemilu Tahun 2004 yang lalu terdiri dari dua tahap. Tahap I untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Sedangkan yang Tahap II untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh lima peserta pemilu. Pada pemilu tahap I diikuti oleh 24 partai peserta pemilu. Partai yang memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Tulungagung masih didominasi oleh partai-partai lama, seperti PDIP, PKB, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, PKS, dan Partai Merdeka, dimana Partai tersebut menurunkan wakil-wakil DPR secara berurut yaitu 15, 13, 6, 5, 1, 1, dan 1 orang wakil. Jadi jumlah anggota DPR Kabupaten Tulungagung sebanyak 45 orang.

Jumlah Penduduk yang memiliki hak memilih di Kabupaten Tulungagung mencapai 972.624 orang. Dan jumlah terbesar ada di Kecamatan Kedungwaru yaitu 81.961 orang pemilih, sedangkan jumlah terkecil adalah di Kecamatan Pucanglaban yaitu 22.085 orang pemilih. Tetapi jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu hanya 713.625 orang, untuk

pemilihan calon legislatif. Sedangkan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahap ke dua, pemilihan Presiden dan Wapres, mengalami kenaikan yaitu 735.625 orang pemilih, yang kemudian naik lagi pada putaran kedua yaitu sebesar 739.372 orang pemilih.

2.4 Penduduk dan Tenaga Kerja

Dari Registrasi penduduk Kabupaten Tulungagung pada akhir tahun 2004 tercatat sebanyak 989.856 jiwa, dengan sex ratio sebesar 99% artinya bahwa jumlah penduduk perempuan 1% lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dimana jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah 498.165 jiwa, sedangkan Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 491.691 jiwa. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pucanglaban paling sedikit jumlah penduduknya yaitu 23.923 jiwa, dan Kecamatan Kedungwaru paling banyak jumlah penduduknya yaitu 79.810 jiwa.

**Tabel 7 : Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Tahun 2004**

Umur	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
0 – 4	43.625	39.921	83.546
5 – 9	40.281	36.809	77.090
10 – 14	42.763	39.296	82.059
15 – 19	49.416	46.948	96.364
20 – 24	37.971	42.925	80.896
25 – 29	39.907	43.793	83.700
30 – 34	38.655	41.552	80.207
35 – 39	37.492	39.292	79.784
40 – 44	33.842	33.655	67.497
45 – 49	30.263	28.837	59.100
50 – 54	23.036	22.568	45.604
55 – 59	20.729	20.015	40.744
60 – 64	18.568	20.321	38.889
60 – 64	18.568	20.321	38.889
65+	35.143	42.233	77.376
Jumlah	491.691	498.165	989.856

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Pada tahun 2004 kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung rata-rata sebanyak 860 jiwa / Km², sedangkan pada tahun 2003 kepadatan rata-rata nya adalah sebesar 856 jiwa / Km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Tulungagung yaitu sebesar 6.069 jiwa / Km², dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Tanggungnung sebesar 209 jiwa / Km².

**Tabel 8 : Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Tahun 2004**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Besuki	92,69	34452	372
2	Bandung	46,96	47026	1001
3	Pakel	38,10	50004	1312
4	Campurdarat	44,71	51157	1144
5	Tanggungnung	114,73	23969	209
6	Kalidawir	113,69	67318	592
7	Pucanglaban	77,92	23923	307
8	Rejotangan	75,67	70893	934
9	Ngunut	39,06	74059	1896
10	Sumbergempol	41,83	62563	1496
11	Boyolangu	37,69	73196	1942
12	Tulungagung	10,83	65730	6069
13	Kedungwaru	33,93	79810	2352
14	Ngantru	41,44	49307	1190
15	Karangrejo	37,98	38378	1010
16	Kauman	29,00	50078	1727
17	Gondang	43,38	54733	1262
18	Pagerwojo	109,03	29736	273
19	Sendang	121,56	43524	358
	Jumlah	1150,41	989856	860

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Dari Tabel diatas paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sendang dengan luas wilayah 121,56 Km², sedangkan paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Tulungagung yang merupakan kecamatan kota memiliki luas wilayah sebesar 10,83 Km². Dari jumlah Penduduk keseluruhan sebesar 989.856 jiwa tersebut, 8.304 penduduk merupakan orang pendatang, sedangkan sisanya merupakan orang asli daerah.

2.5 Sosial Budaya

Permasalahan sosial adalah permasalahan yang timbul dalam masyarakat akibat suatu perubahan atau keadaan yang mengakibatkan gangguan atau kendala baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah masalah kebodohan dan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan musuh terbesar dalam setiap upaya pembangunan suatu bangsa. Keduanya terkait seperti dua sisi mata uang. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan.

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkatan baik formal maupun informal. Di Kabupaten Tulungagung kegiatan pendidikan yang dicakup adalah kegiatan formal baik dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan di luar departemen tersebut. Kegiatan pendidikan diselenggarakan mulai dari SD, SMP, SMU sampai sekolah kejuruan. Walaupun diberlakukan wajib belajar 9 tahun, namun penambahan jumlah murid utamanya di tingkat SD tidak begitu mencolok. Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia srkolah memang berkurang, yang pada akhirnya juga menyebabkan banyak SD yang digabung jadi satu karena kurang murid. Di Kabupaten Tulungagung sekarang mulai bermunculan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempengaruhi orang tua untuk menyekolahkan ke sekolah swasta dari pada sekolah negeri.

Kesehatan merupakan sektor yang sangat penting. Pembangunan kesehatan bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Upaya peningkatan derajat kesehatan di kalangan masyarakat sudah banyak dilakukan diantaranya menambah fasilitas-fasilitas kesehatan serta memberikan penyuluhan kesehatan. Prasarana fisik meliputi rumah sakit, puskesmas, polindes, rumah bersalin, dan tenaga kesehatan. Banyaknya prasarana fisik relatif tetap dari tahun ke tahun, tetapi jumlah tenaga kesehatan mengalami kenaikan pada tahun 2004 ini. Sedangkan pendonor meningkat 24,22 persen pada tahun 2004 yaitu sebanyak 7.809 orang pendonor.

Di Kabupaten Tulungagung jumlah sarana peribadatan, jumlah pernikahan, talak, cerai, rujuk, dan jumlah kegiatan keagamaan rata-rata



mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah jumlah jamaah haji pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 28,53 persen yaitu dari 771 orang tahun 2003 menjadi 515 orang pada tahun 2004. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kuota jamaah haji Indonesia, yang berakibat kuota jamaah Kabupaten Tulungagung juga berkurang.

Kegiatan Keagamaan di Kabupaten Tulungagung terus ditingkatkan, karena kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar agama, dengan harapan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama. Kegiatan pondok pesantren, santapan rohani untuk pengikut/muritnya mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran untuk mencari ilmu utamanya ilmu keagamaan, yang ditandai juga oleh bermunculannya Taman Pendidikan Al – Quran di daerah-daerah yang merupakan salah satu fasilitas untuk menuntut ilmu terutama bagi anak-anak.

Bidang sosial lainnya adalah masalah hukum, dimana jumlah tahanan menurut jenis kejahatan/pelanggaran pada tahun 2004 sebanyak 496 narapidana dengan jenis kejahatan terbanyak yaitu perjudian. Kemudian masalah anak terlantar dan usia lanjut, dimana jumlah lanjut usia dan anak terlantar yang ditampung di panti mengalami penurunan sebesar 47,39 persen yaitu dari 3.910 orang pada tahun 2003 menjadi 2.057 orang tahun 2004.

Perkembangan program KB, baik dilihat dari segi realisasi dan target, serta jumlah keluarga berencana (KB) baik itu pemula maupun sudah lama ada peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran penduduk untuk mengatur kelahiran serta masalah penduduk bukan hanya masalah pemerintah, adalah masalah kita bersama. Sehingga tidak semua tergantung pada pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh swasta.

2.6 Pertanian

Pembangunan sub sektor tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemantaban swasembada pangan. Pada tahun 2004 secara umum ada kenaikan walaupun tidak secara menyeluruh. Hampir semua jenis produksi

tanaman pangan mengalami kenaikan antara lain produksi padi sawah, jagung, ketela pohon, kedelai ubi jalar. Padi adalah produksi terbesar dari pertanian di Kabupaten Tulungagung yaitu mencapai 223.955,27 ton per tahun, sedangkan produksi terkecil adalah tanaman Kacang hijau dengan produksi sebesar 123,00 ton per tahun

**Tabel 9 : Produksi Padi dan Palawija
Menurut Jenis dan Harga Tahun 2004**

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)	Harga Produsen (Rp/Kg)	Keterangan
1	Padi	223 955,27	1 369,00	GKG
2	Jagung	85 590,31	1 093,00	Kering Pasar
3	Ketela Pohon	140 559,00	300,00	Umbi Basah
4	Ubi Jalar	1 773,05	469,00	Umbi Basah
5	Kacang Tanah	4 130,33	1 858,00	Glondong
6	Kacang Hijau	123,92	3 047,00	Kering Pasar
7	Kedelai	6 208,11	2 571,00	Kering Pasar
	Jumlah	462 339,99		

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung

Sektor perikanan yaitu produksi ikan laut pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 17,71 yaitu mencapai 6.188.000 Kg. Jenis ikan laut yang ditangkap adalah ikan kembung , tongkol, layur, Peperek, Layang, Ekor merah dan lain lain. Produksi terbesar ikan laut adalah tongkol yaitu mencapai 2.428.000 Kg. Ikan dengan harga paling mahal adalah ikan kerapu yaitu Rp 12.500 per Kg. Sedangkan untuk pemanfaatan kolam untuk budi daya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung ada dua macam yaitu untuk menghasilkan ikan konsumsi dan ikan hias keduanya memiliki nilai produksi yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 91.050.000.000,-.

Populasi ternak besar dan unggas Di Kabupaten Tulungagung tahun 2004 cukup besar yaitu mencapai 4.531.370,26 Kg daging. Dimana ternak terdiri dari sapi, kerbau, babi, kambing, domba. Sedangkan unggas meliputi Ayam kampung, ayam ras petelor, itik, mentok, dan ayam broiler.

Perkebunan di Kabupaten Tulungagung dibagi dua yaitu perkebunan besar dimana perkebunan diatas tanah negara dengan jenis perkebunan adalah sebagai berikut : kelapa, karet, kapuk randu dan teh. Areal tanaman perkebunan

besar di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai areal terluas adalah perkebunan kelapa yaitu 1.064,4 Ha, disusul kapuk randu sebesar 425,35 Ha. Tetapi produksi tanaman perkebunan yang mempunyai produksi terbesar adalah perkebunan karet yaitu sebesar 158,3 ton yang mengalami kenaikan sebesar 2,66 pada tahun 2004. Yang kedua adalah perkebunan rakyat yaitu kelapa, kopra, tebu, tembakau dalam bentuk rajang kering.

Hutan dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan Produksi, hutan wisata, dan hutan lainnya. Produksi hutan di kabupaten Tulungagung meliputi kayu pertukangan (Jati dan Rimba), kayu bakar, kelapa dan getah pinus. Selama tahun 2004 produksi tertinggi adalah getah pinus dan yang kedua adalah kelapa.

2.7 Industri

Di Kabupaten Tulungagung tercatat bahwa pada tahun 2004 ada 157 perusahaan industri besar/ sedang, yang berarti ada penurunan sebesar 1,88 persen dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan Industri kecil dan Rumah Tangga (IKKR) tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 11,93 persen dengan jumlah industri yang terbanyak pada kelompok barang kayu dan hasil hutan yang lainnya yaitu sebanyak 3.993 unit, karena di Kecamatan Gondang, Bandung dan Sumbergempol sebagian desanya merupakan daerah potensi industri anyam-anyaman dari bambu. Sedangkan tenaga kerja banyak yang terserap pada industri brang kayu dan hasil hutan lainnya yaitu sebanyak 2.122 tenaga kerja, karena Tulungagung terkenal dengan daerah konveksi.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik di kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yaitu dari 193.896 pelanggan pada tahun 2003 menjadi 198.571 pelanggan pada tahun 2004. Sehingga jumlah KWH yang terjual pada tahun 2004 adalah sebesar 22.636.209 KWH.

Kebutuhan air dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk dan perumahan. Hal ini bisa dilihat dari produksi air minum selama tahun 2004 yang meningkat sebesar 4,24 persen jika dibanding tahun sebelumnya. Pelanggan air minum di Kabupaten Tulungagung sebanyak

13.812 pelanggan. Sedangkan jumlah air yang disalurkan sebesar 2.738.972 m³ dengan nilai Rp 3.668.295.540,-.

2.8 Perdagangan

Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi daerah maupun nasional. Perdagangan di Kabupaten Tulungagung yang terbesar bentuk usahanya adalah perorangan yaitu sebesar 5.792 usaha, yang kedua CV sebesar 221 usaha. Sedangkan menurut golongan usaha dibedakan menjadi perdagangan besar, menengah dan kecil yang masing masing mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

**Tabel 10 : Perdagangan menurut Kecamatan dan Bentuk Usaha
Tahun 2004**

No	Kecamatan	PT	Koper asi	CV	Firma	Perora ngan	BUL	Jumlah
1	Besuki	1	7	7	-	114	-	129
2	Bandung	-	9	11	-	181	-	201
3	Pakel	-	11	13	-	146	1	171
4	Campurdarat	1	13	22	-	440	-	476
5	Tanggunggunung	-	4	-	-	17	-	21
6	Kalidawir	-	17	22	-	136	1	176
7	Pucanglaban	-	3	1	-	6	-	10
8	Rejotangan	1	12	35	-	373	-	421
9	Ngunut	6	12	48	1	527	-	594
10	Sumbergempol	1	11	17	-	263	-	292
11	Boyolangu	6	17	87	-	372	-	482
12	Tulungagung	40	33	273	1	1626	3	1976
13	Kedungwaru	7	21	94	-	647	1	770
14	Ngantru	1	5	31	-	258	-	295
15	Karangrejo	-	6	15	-	162	-	183
16	Kauman	5	12	59	-	17	-	360
17	Gondang	1	12	19	-	61	-	194
18	Pagerwojo	-	13	2	-	5792	1	33
19	Sendang	-	3	6	-	-	-	70
	Jumlah	70	221	762	2	-	7	6854

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

Ekspor di Kabupaten Tulungagung masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih lemahnya daya saing produk ekspor karena belum sesuai dengan

mutu internasional. Nilai ekspor Kabupaten Tulungagung pada tahun 2004 mencapai Rp 6451.107.000,-. Ekspor terbesar dari perusahaan PT Dwi Tunggal Marmer yang memproduksi marmer dengan tujuan negara Korea, Jepang, Australia, dan USA dengan nilai ekspor sebesar 43,39 persen dari total nilai ekspor. Kerajinan marmer juga merupakan produk unggulan kabupaten Tulungagung.

2.9 Perhubungan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian. Panjang jalan raya di Kabupaten Tulungagung mencapai 1.352,15 Km yang terbagi atas jalan kabupaten 1.294,50 Km, jalan propinsi 9,57 Km dan jalan negara 48,08 Km. Kondisi jalan terbagi menjadi beberapa kondisi yaitu kondisi baik, sedang, dan rusak ringan.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung dari tahun ketahun semakin meningkat, dan pada tahun 2004 jumlah kendaraan mencapai lebih dari 200.000 unit. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor meningkatkan pula jumlah kecelakaan yang terjadi dengan kerugian mencapai Rp31.951.000,-. Sedangkan untuk kendaraan umum seperti bus umum mencapai 643 unit dengan jumlah penumpang mencapai 353.350 orang pada tahun 2004.

**Tabel 11 : Kendaraan yang ada di Tulungagung
Menurut Jenisnya (Kendaraan Wajib Uji) Tahun 2004**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1	Bus Umum	643
2	Bus bukan umum	45
3	Mobil box	528
4	Mobil penumpang umum	370
5	Truk umum	658
6	Truk bukan umum	2323
7	Truk gandeng	286
8	Kontainer	12
9	Pick up	4212
	Jumlah	9077

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung

Dalam era globalisasi ini, peran telekomunikasi sangatlah penting, sebab tanpa adanya sarana telekomunikasi (seperti Pos dan Giro) yang baik dan mudah tentunya akan banyak ketinggalan informasi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketertinggalan. Dengan banyak informasi yang diperoleh akan mendorong kita untuk segera bangkit untuk melaksanakan pembangunan setidaknya sama atau bahkan lebih dari daerah lain.

Pada tahun 2004 kantor pos melakukan pelayanan pengiriman wesel, paket, dan surat masing-masing sebanyak 8.048, 7.455 dan 355.267. Penurunan surat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini karena masyarakat lebih memilih sarana yang lebih efektif untuk berkomunikasi yaitu dengan menggunakan telepon.

Sedangkan untuk hotel, di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2004 mengalami kenaikan yaitu dari 18 hotel pada tahun 2003 menjadi 19 hotel pada tahun 2004. Untuk jumlah tamu yang menginap di hotel mengalami penurunan untuk tamu domestik, dan jumlah tamu asing mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

2.10 Keuangan

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka ada juga kewenangan dalam rangka mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah yang berdampak pada keuangan daerah, baik mengenai sumber maupun alokasinya. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp 26.894.838.205,-.

Perbankan sangat diperlukan dalam pergerakan ekonomi suatu daerah, jadi diperlukan suatu tempat untuk keluar masuknya dana usaha yang memerlukan waktu yang cepat untuk aliran dananya. Dewasa ini hampir semua perbankan sudah menggunakan fasilitas tersebut.

Salah satu alternatif menggerakkan perekonomian adalah kegiatan koperasi. Banyaknya koperasi pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 7,19 persen dibandingkan dengan tahun 2003, demikian juga dengan sisa hasil usahanya (SHU). Pertumbuhan juga terjadi dibidang asuransi dan pegadaian dimana nasabah baru asuransi pada tahun 2004 mencapai 3.255 orang. Sedangkan

untuk pegadaian pada tahun 2004 jumlah kredit, pelunasan dan lelang untuk semua pegadaian di Kabupaten Tulungagung secara berturut-turut adalah Rp 16.532.534.000,-; Rp 15.634.639.000,-; dan Rp 98.600.000,-.

Pada tahun 2004 inflasi sebesar 5,25 persen terbagi dalam tujuh kelompok, dimana inflasi terbesar pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yaitu sebesar 8,33 persen, diikuti dengan kelompok bahan makanan sebesar 7,11 persen, kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 6,40 persen.

Tabel 12 : Inflasi Menurut Bulan Tahun 2004

Bulan	Inflasi (persen)
Januari	0,24
Februari	0,12
Maret	0,36
April	0,41
Mei	0,42
Juni	0,38
Juli	0,25
Agustus	0,24
September	-0,29
Oktober	0,61
November	1,35
Desember	1,05

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung

2.11 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung atas dasar harga yang berlaku secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 12,14 persen pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp4.782.054,14 juta. Sumbangan terbesar terletak pada sektor perdagangan diikuti sektor industri pengolahan dan pertanian dengan kontribusi masing-masing 26,22 persen; 19,66 persen; dan 18,39 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 1993 mengalami kenaikan sebesar 5,02 persen pada tahun 2004 yaitu Rp 1.335.994,77.

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,59 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2004, terutama didukung oleh pertumbuhan pada sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

meskipun memberikan sumbangan sebesar 26,22 persen terhadap total PDRB tetapi pertumbuhannya 6,48 persen. Sedangkan inflasi dari PDRB pada tahun 2004 sebesar 6,78%.



BAB III PENYAJIAN DATA

3.1 Pengantar

Pada bab ini akan dipaparkan tentang gambaran data sekunder yang didapat oleh penulis. Langkah ini sebagai kelanjutan dari proses pengumpulan data dari lokasi penelitian yang terkait dengan obyek penelitian. Lokasi penelitian ini diantaranya yaitu di Dispenda, Bagian Keuangan Pemda, Bappeda. Data yang terkumpul disajikan secara teratur dan sistematis dalam rangka membantu kemudahan proses analisis data sesuai dengan variabel penelitian.

Dalam penelitian ini ada 3 data pokok yang mendasari penelitian, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung
2. Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung
3. APBD Kabupaten Tulungagung

3.2 Gambaran Penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung

PAD adalah pendapatan daerah yang asli dari daerah yang dipungut oleh daerah. Lebih lanjut Widjaya mengatakan bahwa PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungannya dengan pemerintah pusat,

Semakin besar penerimaan PAD berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pemerintahan akan lebih baik, dan semakin tinggi kontribusi terhadap total penerimaan daerah yang tercantum dalam APBD, maka bisa dikatakan bahwa daerah itu semakin mandiri dalam pembiayaan daerah.

Sumber PAD Kabupaten Tulungagung merupakan sumber keuangan daerah yang digali didalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari : hasil pajak, hasil retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Gambaran tentang PAD aktual Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2001 - 2004, yang disajikan dalam periode semester dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 13 : Penerimaan PAD dan sumber -sumbernya
Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Kwartal	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain -lain Pendapatan Daerah	Total
4	2001	I	952.448.721,00	1.788.214.943,25	7.013.102,00	39.357.001,75	2.787.033.768,00
5		II	797.176.505,00	1.826.074.791,24	50.000.000,00	32.986.261,26	2.706.237.557,50
6		III	823.499.832,00	1.937.595.948,62	2.500.000,00	111.794.765,38	2.875.390.546,00
7		IV	911.398.788,00	2.102.765.845,75	15.650.000,00	227.960.541,75	3.257.775.175,50
8	2002	I	1.562.252.467,00	2.442.821.993,87	7.760.020,00	140.822.350,88	4.153.656.831,75
9		II	1.181.269.604,00	2.786.119.471,75	10.000.000,00	599.200.366,04	4.576.589.441,79
10		III	1.422.075.680,00	2.989.049.599,07	26.101.800,00	466.412.600,47	4.903.639.679,54
11		IV	1.237.057.423,00	3.030.726.974,50	62.500.000,00	416.758.485,93	4.747.042.883,43
12	2003	I	2.093.750.987,00	3.526.024.504,87	7.562.237,00	725.375.769,70	6.352.713.498,57
13		II	1.730.698.015,00	3.562.591.576,49	361.585.573,35	496.954.727,83	6.151.829.892,67
14		III	2.215.229.920,00	3.795.954.286,89	49.960.501,00	562.549.050,70	6.623.693.758,59
15		IV	2.044.887.198,00	3.925.581.662,49	211.133.764,22	1.004.572.411,91	7.186.175.036,62
16	2004	I	2.088.479.066,00	4.342.950.996,75	43.092.300,00	135.548.186,51	6.610.070.549,26
17		II	2.161.797.099,00	4.019.499.649,80	201.064.303,37	30.261.833,35	6.412.622.885,52
18		III	1.716.674.943,00	4.064.096.570,00	57.642.450,00	102.382.111,87	5.940.796.074,87
19		IV	2.847.481.163,00	4.917.643.251,24	46.809.799,00	119.414.481,52	7.931.348.694,76
		rata - rata	1.611.636.088,19	3.191.107.004,16	72.523.490,62	325.771.934,18	5.201.038.517,15

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah)

Tabel 14 : Pertumbuhan PAD dan sumber-sumbernya
Kabupaten Tulungagung

No	Tahun	Bulan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah	Total
1	2001	I	-16,30	2,12	612,95	-16,19	-2,90
2		II	3,30	6,11	-95,00	238,91	6,25
3		III	10,67	8,52	526,00	103,91	13,30
4		IV	71,41	16,17	-50,42	-38,23	27,50
5	2002	I	-24,39	14,05	28,87	325,50	10,18
6		II	20,39	7,28	161,02	-22,16	7,15
7		III	-13,01	1,39	139,45	-10,65	-3,19
8		IV	69,25	16,34	-87,90	74,05	33,82
9	2003	I	-17,34	1,04	4.681,46	-31,49	-3,16
10		II	28,00	6,55	-86,18	13,20	7,67
11		III	-7,69	3,41	322,60	78,58	8,49
12		IV	2,13	10,63	-79,59	-86,51	-8,02
13	2004	I	3,51	-7,45	366,59	-77,67	-2,99
14		II	-20,59	1,11	-71,33	238,32	-7,36
15		III	65,87	21,00	-18,79	16,64	33,51
16		IV					

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah)

Dari data yang di peroleh (Tabel 13) nilai masing-masing sumber mengalami fluktuasi dengan prosentase perubahan dapat dilihat pada tabel 14.

Pajak Daerah dalam tahun anggaran 2001 - 2004 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada kuartal II tahun 2001, kuartal II dan IV tahun 2002, kuartal II dan IV tahun 2003, dan kuartal III tahun 2004. penurunan tertinggi terjadi pada kuartal III tahun 2004 yaitu turun 20,59%, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal IV tahun 2004 mencapai 65,87%. Sesuai dengan tabel 17 perolehan pajak daerah terkecil terjadi pada kuartal II tahun 2001 yaitu Rp 797.176.505,00. Sedangkan perolehan pajak daerah terbesar terjadi pada kuartal IV tahun 2004 yaitu mencapai Rp 2.847.481.163,00. Secara keseluruhan rata-rata pajak daerah tahun anggaran 2001 – 2004 sebesar Rp 1.611.636.088,19.

Berbeda dengan perolehan Retribusi daerah dimana dari semester ke semester tahun anggaran 2001 - 2004 terus menerus mengalami kenaikan, kecuali pada kuartal II tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 7,45% Hal ini dikarenakan adanya pos-pos baru yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupayen Tufungagung. Sesuai dengan tabel 13 perolehan terbesar dalam retribusi daerah yaitu pada kuartal IV pada tahun 2004 yaitu mencapai Rp4.917643251,24 , sedangkan perolehan retribusi daerah terkecil sebesar Rp 1.788.214.943,25 terjadi pada kuartal I tahun 2001. Secara keseluruhan rata-rata retribusi daerah tahun 2001 –2004 yaitu Rp 3.191.107.004,16

Pada sektor Laba usaha daerah dan Lain-lain pendapatan daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang tinggi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan politik Nasional pada tahun anggaran 2001 - 2004 yang tidak stabil. Seperti adanya Pemilu pada tahun 2004. Pada sektor laba usaha daerah Nilai tertinggi terjadi pada kuartal II tahun 2003 yaitu mencapai Rp 361.585.573,35 sedangkan yang terkecil yaitu sebesar Rp2.500.000,00 terjadi pada kuartal III tahun 2001. Perolehan tertinggi sektor lain-lain pendapatan daerah terjadi pada kuartal IV tahun 2003 mencapai Rp 1.004.572.411,91 , sedangkan perolehan terkecil yaitu sebesar Rp 30.261.833,35 terjadi pada kuartal II tahun 2004.

Maka Penerimaan PAD tahun anggaran 2001 - 2004 dari kuartal ke kuartal berikutnya mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi yang tajam).

Penurunan terjadi pada kuartal II tahun 2001, kuartal IV 2002, kuartal II tahun 2003 dan kuartal I, II, IV tahun 2004. Penurunan tertinggi terjadi pada kuartal I tahun 2004 yaitu turun 8,02%, sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada kuartal I tahun 2003 yaitu naik mencapai 33,82%. Perolehan PAD terbesar sesuai dengan tabel 13 terjadi pada kuartal IV tahun 2004 yaitu mencapai Rp 7.931.348.694,76, sedangkan perolehan PAD terkecil yaitu sebesar Rp 2.706.237.557,50 terjadi pada kuartal II tahun 2001. Secara keseluruhan rata-rata penerimaan PAD tahun ajaran 2001 – 2004 adalah sebesar Rp 5.021.038.517,15

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber penerimaan dari retribusi daerah memberi kontribusi terbesar bagi PAD aktual Kabupaten Tulungagung 2001 - 2004. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi rata-rata sebesar Rp 3.191.107.004,16. Penerimaan Retribusi daerah sangat besar karena jenis retribusi yang bisa dipungut oleh pemerintah Kabupaten Jember sangat banyak dan proses pemungutan yang mudah dan cepat. Selain itu ada imbalan bagi wajib retribusi secara langsung berupa jasa/layanan.

3.3 Gambaran Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Sumber penerimaan daerah tercantum dalam APBD, tepatnya dalam sumber penerimaan APBD. APBD terdiri atas : Penerimaan APBD dan Pengeluaran APBD. Penerimaan APBD yang disebut juga penerimaan daerah terdiri dari : PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Pemerintah Daerah, Lain-lain penerimaan yang sah, dan Sisa lebih anggaran tahun lalu.

Perkembangan Penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2000 / 2004, yang disajikan dalam periode kuartal (tiga bulanan), ditunjukkan Tabel 15 dan Tabel 16

Dari data yang diperoleh (Tabel 15) nilai masing-masing sumber penerimaan daerah mengalami fluktuasi dengan prosentase perubahan yang dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 10 : Penerimaan Daerah dan sumber-sumbernya
Kabupaten Tulungagung

No Tahun Kwartal	SLPATL	PAD	Dana Perimbangan Daerah	Pinjaman Pemerintah Daerah	Lain-lain Penerimaan yang Sah	Total
1 2001	107.224.583,25	2.787.033.768,00	45.199.418.592,00	0,00	0,00	48.093.676.943,25
2	107.224.583,25	2.706.237.557,50	60.900.284.576,00	0,00	367.354.990,22	64.081.101.706,97
3	107.224.583,25	2.875.390.546,00	74.763.913.777,00	0,00	517.036.000,00	78.263.564.906,25
4	107.224.583,25	3.257.775.175,50	52.232.210.776,00	0,00	16.814.865.836,63	72.412.076.371,38
5 2002	2.246.815.378,50	4.153.656.831,73	66.660.265.096,00	0,00	1.116.023.684,00	74.176.760.990,23
6	2.246.815.378,50	4.576.589.441,81	69.051.381.262,00	0,00	2.558.928.419,21	78.433.714.501,52
7	2.246.815.378,50	4.903.639.679,54	69.746.050.126,42	0,00	6.202.885.404,97	83.099.390.589,43
8	2.246.815.378,50	5.747.042.883,43	75.926.048.904,40	0,00	8.819.735.802,36	92.739.642.968,69
9 2003	4.788.855.167,50	6.352.713.498,57	102.010.744.157,00	0,00	13.504.385.486,00	126.656.698.309,07
10	4.788.855.167,50	6.151.829.892,67	72.939.664.796,00	0,00	8.597.904.099,00	92.478.253.955,17
11	5.955.216.431,76	6.623.591.758,59	88.470.905.137,00	0,00	10.368.957.809,00	111.418.671.136,35
12	5.955.216.431,76	7.186.277.036,62	62.623.750.785,00	0,00	11.995.419.767,00	87.760.664.020,38
13 2004	2.135.225.967,35	6.610.070.549,26	105.544.008.433,00	0,00	6.887.215.373,00	121.176.520.322,61
14	2.135.225.967,35	6.412.624.905,52	85.809.953.544,00	0,00	26.625.422.538,00	120.983.226.954,87
15	2.135.225.967,35	5.940.794.054,87	84.383.235.834,00	0,00	10.326.801.032,00	102.786.056.888,22
16	2.135.225.967,35	7.931.350.715,76	66.569.709.968,00	0,00	38.719.982.799,32	115.356.269.450,43
rata - rata	2.465.325.432,18	5.263.538.643,46	73.926.971.610,24	0,00	10.213.932.440,04	91.869.768.125,93

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah)

Tabel 16 : Pertumbuhan Penerimaan Daerah dan Sumber - sumbernya
Kabupaten Tulungagung

No Tahun	Kwartal	SL.P.A.T.L	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman Daerah	Penerimaan yang Sah	Lain-lain	Total
1	2001							
2	I	0,00	-2,90	34,74	-	-	-	33,24
3	II	0,00	6,25	22,76	0,00	40,75		22,13
4	III	0,00	13,30	-30,14	0,00	3.152,17		-7,48
5	IV	1.995,43	27,50	27,62	0,00	-93,36		2,44
6	I	0,00	10,18	3,59	0,00	129,29		5,74
7	II	0,00	7,15	1,01	0,00	142,40		5,95
8	III	0,00	17,20	8,86	0,00	42,19		11,60
9	IV	113,14	10,54	34,36	0,00	53,12		36,57
10	I	0,00	-3,16	-28,50	0,00	-36,33		-26,99
11	II	24,36	7,67	21,29	0,00	20,60		20,48
12	III	0,00	8,50	-29,22	0,00	15,69		-21,23
13	IV	-64,15	-8,02	68,54	0,00	-42,58		38,08
14	I	0,00	-2,99	-18,70	0,00	286,59		-0,16
15	II	0,00	-7,36	-1,66	0,00	-61,21		-15,04
16	III	0,00	33,51	-21,11	0,00	274,95		12,23
16	IV	0,00						

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (diolah)

SLPATL (Sisa Lebih Perolehan Anggaran Tahun Lalu) merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya diman SLPATL ini dianggap modal awal perhitungan Pendapatan Daerah. Modal awal ini mengalami perubahan setiap tahun, sedangkan setiap kwartal tidak terjadi perubahan (tetap). Untuk sektor Pendapatan Daerah mengikuti perhitungan Penerimaan PAD pada sub bab sebelumnya.

Pada sumber penerimaan Dana perimbangan tahun anggaran 2001 - 2004 rata – rata mengalami kenaikan, kecuali pada kwartal IV tahun 2001, kwartal II dan IV tahun 2003, dan kwartal I, II dan III tahun 2004. Penurunan tertinggi terjadi pada kwartal IV tahun 2003 yaitu turun 29,22 %, sedangkan Kenaikan terbesar terjadi pada kwartal I tahun 2004 yaitu naik 68,54 %. Sesuai dengan tabel 15 Dana Perimbangan tertinggi terjadi pada kwartal I tahun 2004 yaitu mencapai Rp 105.544.008.433,00. Sedangkan dana perimbangan terkecil terjadi pada kwartal I tahun 2001 yaitu sebesar Rp 45.199.418.592,00. Secara keseluruhan rata- rata dana perimbangan tahun anggaran 2001 – 2004 adalah sebesar Rp 73.926.971.610,24.

Sedangkan untuk, Pinjaman pemerintah daerah tahun anggaran 2000 / 2004 di Kabupaten Tulungagung adalah kosong atau tidak melakukan pinjaman apapun. Hal ini dikarenakan pengeluaran selalu disesuaikan dan tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Sektor Lain-lain penerimaan daerah yang sah pada tahun anggaran 2001 – 2004 rata – rata mengalami kenaikan. Kecuali pada kwartal I tahun 2002, kwartal II tahun 2003 dan kwartal I dan III tahun 2004. Penurunan tertinggi terjadi pada kwartal I tahun 2002 yaitu turun 93,36 %, sedangkan Kenaikan tertinggi terjadi pada kwartal IV tahun 2001 yaitu naik 3.152,17%. Sesuai dengan tabel 15 Lain-lain Penerimaan yang sah tertinggi terjadi pada kwartal IV tahun 2004 yaitu mencapai Rp 38.719.982.799,32 , sedangkan yang terkecil adalah kosong (tidak ada pemasukan). Secara keseluruhan rata-rata dari sektor Lain-lain penerimaan yang sah tahun anggaran 2001 –2004 sebesar Rp 10.213.932.440,04.

Maka Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2001 – 2004 rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada kwartal IV tahun 2001,

kwartal II dan IV tahun 2003, kwartal II dan III tahun 2004. Penurunan terbesar terjadi pada kwartal II tahun 2003 yaitu turun 26,99% , sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada kwartal I tahun 2004 yaitu naik 38,08%. Sesuai dengan tabel 15 nilai Pendapatan Daerah terbesar terjadi pada kwartal I tahun 2003 yaitu mencapai Rp 126.656.698.309,07 , sedangkan Nilai terkecil terjadi pada kwartal I tahun 2001 yaitu sebesar Rp 48.093.676.943,25. Secara keseluruhan rata-rata Pendapatan Daerah tahun anggaran 2001 - 2004 adalah sebesar Rp 91.869.768.125,93.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Daerah terbesar disumbang oleh Dana Perimbangan dengan rata-rata Rp 73.926.971.610,24. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang merupakan subsidi dari pemerintah pusat masih mendominasi total Pendapatan Daerah.

3.4 Gambaran APBD Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan tugas daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dibiayai atas beban APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Didalam APBD terkait dengan alokasi sumber-sumber keuangan antara pusat dan daerah, dimana hal ini menyebabkan penentuan kebijakan keuangan daerah. Jadi dalam APBD tergambar pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Realisasi APBD Kabupaten Tulungagung tersusun dari penerimaan dan pengeluaran daerah. Dimana pengeluaran terdiri dari : Penerimaan Rutin dan Penerimaan Pembangunan.

Gambaran perkembangan APBD Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tahun anggaran 2001 - 2004, yang disajikan periode kwartal (tiga bulanan) dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 17 Pertumbuhan APBD Kabupaten Tulungagung
 Tahun Anggaran 2001 - 2004

No Tahun	Kwartal	Penerimaan				Pengeluaran				Total	Perubahan
		Rutin		Pembangunan		Rutin		Pembangunan			
		Nilai	Perubahan	Nilai	Perubahan	Nilai	Perubahan	Nilai	Perubahan		
2000	I	48.093.676.943,25	-	56.564.800.688,03	-	10.845.323.044,50	-	67.410.123.732,53	-	0,00	
	II	64.081.101.706,97	33,24	56.564.800.688,03	0,00	0.845.323.044,50	0,00	67.410.123.732,53	0,00	0,00	
	III	78.263.564.906,25	22,13	56.564.800.688,03	0,00	10.845.323.044,50	0,00	67.410.123.732,53	0,00	0,00	
	IV	72.412.076.371,38	-7,48	56.564.800.688,03	0,00	10.845.323.044,50	0,00	67.410.123.732,53	0,00	13,70	
2001	I	74.176.760.990,23	2,44	62.263.059.698,93	10,07	14.384.400.330,00	0,00	76.647.460.028,93	0,00	0,00	
	II	78.433.714.501,52	5,74	62.263.059.698,93	0,00	14.384.400.330,00	0,00	76.647.460.028,93	0,00	0,00	
	III	83.099.390.589,43	5,95	62.263.059.698,93	0,00	14.384.400.330,00	0,00	76.647.460.028,93	0,00	0,00	
	IV	92.739.642.968,69	11,60	62.263.059.698,93	0,00	14.384.400.330,00	0,00	76.647.460.028,93	0,00	33,73	
2002	I	126.656.698.309,07	36,57	78.363.170.659,39	25,86	24.135.920.477,50	67,79	102.499.091.136,89	0,00	0,00	
	II	92.478.253.955,17	-26,99	78.363.170.659,39	0,00	24.135.920.477,50	0,00	102.499.091.136,89	0,00	0,00	
	III	111.418.671.136,35	20,48	78.363.170.659,39	0,00	24.135.920.477,50	0,00	102.499.091.136,89	0,00	0,00	
	IV	87.760.664.020,38	-21,25	78.363.170.659,39	0,00	24.135.920.477,50	0,00	102.499.091.136,89	0,00	12,05	
2004	I	121.176.520.322,61	38,08	89.559.912.284,97	14,29	25.289.858.077,50	4,78	114.849.770.362,47	0,00	0,00	
	II	120.983.226.954,87	-0,16	89.559.912.284,97	0,00	25.289.858.077,50	0,00	114.849.770.362,47	0,00	0,00	
	III	102.786.056.888,22	-15,04	89.559.912.284,97	0,00	25.289.858.077,50	0,00	114.849.770.362,47	0,00	0,00	
	IV	115.356.269.450,43	12,23	89.559.912.284,97	0,00	25.289.858.077,50	0,00	114.849.770.362,47	0,00	3,97	
Rata-rata		91.869.768.125,93	7,84	71.687.735.832,83	3,35	18.663.875.482,38	7,01	90.351.611.315,20			

Sumber: Sekretariat Keuangan Kabupaten Tulungagung (diolah)

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa penerimaan APBD yang merupakan total penerimaan daerah setiap semester rata-rata mengalami kenaikan. Meskipun ada beberapa semester mengalami penurunan, tetapi setiap tahunnya selama tahun anggaran 2001 - 2004 mengalami kenaikan yang berarti. Hal ini dikarenakan antar kuartal I, II, III dan IV pada setiap tahunnya saling mengisi, sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Penerimaan mengalami peningkatan setiap kwartalnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,84 % dengan perubahan terbesar terjadi pada kuartal I tahun 2004 yaitu naik 38,06 %, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kuartal II tahun 2003 yaitu turun 26,99 %. Hal ini terjadi karena masing-masing pos penerimaan daerah mengalami pertumbuhan yang sangat besar sehingga mempengaruhi total penerimaan daerah.

Sedangkan dari sisi pengeluaran mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,97 %. Pengeluaran rutin terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan nilai perkwartalnya sebesar Rp 89.559.912.284,97. Pada tahun 2004 nilai pengeluaran pembangunan merupakan angka terbesar selama kurun waktu tersebut yaitu perkwartalnya sebesar Rp 25.289.858.077,50, dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 3,35 % untuk pengeluaran rutin dan 7,01 % untuk pengeluaran pembangunan.

Di kuartal I tahun 2002 baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 25,86 % dan 67,79 % sehingga pertumbuhan total pengeluaran pada semester tersebut merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 33,33 %.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan gambaran dari pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Dengan kesimpulan ini diharapkan dapat mengetahui upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dari hasil Analisa Data Regresi linier sederhana variable PAD terhadap Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama 16 kwartal terakhir yaitu tahun anggaran 2001 – 2004 dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :
 - a) Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 0,469 artinya bahwa 46,9% Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh faktor penerimaan PAD. Atau dengan kata lain bahwa 46,9% variabel X mempengaruhi variabel Y, sedangkan sisanya tidak dimasukkan dalam model ini, atau dipengaruhi oleh faktor lain diluar model ini.
 - b) Standard Error of the Estimate dari hasil regresi adlah sebesar 0,0081, sedangkan Standar Deviation adalah sebesar 0,0174. Ini berarti Standard Error or the Estimate lebih kecil dari pad Standard Deviation, maka bisa dikatakan bahwa model regresi yang digunakan lebih baik dalam bertindak sebagai predictor DDFD (Kemandirian Keuangan Daerah) dari pada rata-rata DDFD sendiri.
 - c) Koefisien Regresi diketahui sebesar 0,00000000000436 ini berarti ada pengaruh yang positif antara PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung. Dimana apabila ada penambahan 100 milyar penerimaan PAD maka DDFD akan naik menjadi 4,36. Hal tersebut dipengaruhi oleh sangat kecilnya kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam dimensi politik untuk menjaga stabilitas nasional.

- d) Taraf signifikansi adalah sebesar 0,003. Jadi nilai ini lebih kecil dari 0,05 artinya selama 16 kuartal tersebut yaitu tahun 2001 – 2004 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Dari Hasil Analisa data dengan melihat pada Proprs PAD dan IKR Daerah Kabupaten Tulungagung selama 16 kuartal terakhir yaitu tahun 2001 – 2004 maka dapat diketahui bahwa :
- Rata – rata proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama 16 kuartal yaitu tahun 2001 - 2004 adalah sebesar 5,62 %. Nilai ini kurang dari 30 % maka dapat diartikan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah belum mandiri.
 - Rata – rata IKR selama 16 kuartal yaitu tahun 2001 – 2004 sebesar 7,11%. Nilai ini kurang dari 100 % maka dapat diartikan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya, atau dengan kata lain Keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan otonomi daerah belum mandiri.

5.2 Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah yaitu agar daerah dapat lebih mandiri dalam bidang keuangan , maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung perlu untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga PAD tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap total Pendapatan Daerah. Kebijakan yang bisa ditempuh adalah :

a) Intensifikasi yaitu upaya meningkatkan PAD dari sumber – sumber yang telah ada selama ini. Intensifikasi ini ditekankan pada pengawasan terhadap petugas lapangan yang memungut pajak dan retribusi, sehingga tidak terjadi kebocoran dana.

b) Ekstensifikasi yaitu usaha meningkatkan PAD dengan cara mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh : Dengan dibangunnya Waduk Wonorejo sebagai pengatur irigasi sekaligus tempat wisata di desa Wonorejo kecamatan Pageryojo, merupakan lahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru. Dimana disana banyak dibangun hotel, restoran dan tempat wisata yang potensial untuk menambah pemasukan PAD.

2. Meningkatkan kualitas aparat Pemerintah Daerah, penertiban administrasi (efisiensi birokrasi), dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan PAD sehingga meningkatkan pelayanan publik.
3. Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu lebih mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait seperti Dirjen Pajak, DPRD dan lain-lain dalam rangka meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Citra Umbara. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*. Bandung
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, terjemahan Amanullah*. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, terjemahan Masri Muris*. Jakarta: UI Press
- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Juliantara, Dadang. 2000. *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kuncoro, Mudrajat. 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Prisma No 4, April 1995: Jakarta hal 3 - 37
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Marsono. 1999. *Himpunan Peraturan tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Djambatan

- Radianto, Elia. 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi di Maluku*. Jakarta :Prisma Maret 1997,LP3ES Hal 39-50
- Rohman, Hermanto. 2003. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah*. Skripsi S1 FISIP. Jember: Universitas Jember
- Santoso, Bagus. *Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah Tingkat II*. dalam Prisma No 4, April 1995, LP3ES, Jakarta, Hal 19-35
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS versi 10 Mengolah Data Statistik secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Singarimbun, Masri. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soemarsono, Sonny. 2000. *Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah*. Tesis Magister Manajemen, Jember: Universitas Jember
- Soekarwo 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga Universitas Press
- Soelistyo. 1987. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta; BPFE
- Suarnata, I Nengah. 2000. *Peranan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Proyeksinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Tesis Magister Manajemen. Jember: Universitas Jember
- Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Supranto, J. 1995. *Ekometrik Buku I*. Jakarta: LPFE-UI
- Surachmad, Winarno. 1990. *Dasar-Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Transito
- Syamsi, Ibnu.1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifudin, Mud'har. 2001. *Profesionalisme Aparatur Pemerintahan dalam pelayanan Publik*. Laporan Penelitian. Jember: Lemlit Universitas Jember

Widjaya. 1992. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II*. Yogyakarta: CV Rajawali Press

Wijayanti, Elisa. 2004. *Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Dan Proyeksinya di Kabupaten Temanggung*. Tesis Magister Administrasi Publik. Jember: Universitas Jember





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 11 April 2001

Nomor : 970 / 217/424.51 / 2001
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pendapatan
Tahun Anggaran 2001
Laporan BL Maret 2001

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Biro Otonomi Daerah
Setda Jawa Timur
di -
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan
Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2001 keadaan bulan Maret 2001

Kode Pos	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%
1.1	SISA LEBIH TH. LALU	428.898.333,00	428.898.333,00	100,0
1.2	PAD	9.003.883.600,00	2.787.033.768,00	30,9
1.2.1.	Pajak Daerah	2.607.600.000,00	952.448.721,00	36,5
1.2.2.	Retribusi Daerah	6.223.623.600,00	1.788.214.943,25	28,7
1.2.3.	Bag. Laba Usaha Daerah	75.000.000,00	7.013.102,00	9,3
1.2.4.	Lain-lain Pendapatan	97.660.000,00	39.357.001,75	40,3
1.3	DANA PERIMBANGAN	188.493.700.000,00	45.199.418.592,00	23,9
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	10.420.000.000,00	633.327.758,00	6,1
1.3.2.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	23.700.000,00	0,00	0,
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum	178.050.000.000,00	44.566.090.834,00	25,
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	1.735.000.000,00	0,00	0,
1.5.3	Pos Penerimaan dari Propinsi	1.735.000.000,00	0,00	0
	JUMLAH	199.661.481.933,00	48.415.350.693,00	24

Demikian untuk menjadikan periksa.

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Drs. EKO SUGIONO, MM
Pembina
NIP. 010 170 779

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Setda Jawa Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung 23 Juli 2001

Nomor : 970/885/424.11/2001
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Pendapatan
 Tahun Anggaran 2001
 Laporan RL Juni 2001.

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Daerah
 Selds Jawa Timur
 di -
 SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan
 Kab. Tulungagung Tahun Anggaran 2001 keadaan bulan Juni 2001.

Kode Pos	JENIS PUNGUTAN	TARIF	REALISASI	%	Ket
1.1	SISA LEBIH TIU. LALU	428.898.333,00	428.898.333,00	100,00	
1.2	P.A.D	9.003.883.600,00	5.493.271.325,50	61,01	
1.2.1	Pajak Daerah	2.607.600.000,00	1.740.625.226,00	67,10	
1.2.2	Retribusi Daerah	6.223.623.600,00	3.614.289.734,40	58,07	
1.2.3	Bag. Laba Usaha Daerah	75.000.000,00	57.013.102,00	76,02	
1.2.4	Lain - lain Pendapatan	97.660.000,00	72.343.263,01	74,08	
1.3	DANA PERIMBANGAN	188.493.700.000,00	106.099.703.186,00	56,29	
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	10.420.000.000,00	1.338.499.148,00	12,85	
1.3.2	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	23.700.000,00	294.981.667,00	1.214,05	
1.3.3	Pos Dana Alokasi Umum	178.050.000.000,00	104.466.222.351,00	58,67	
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	1.735.000.000,00	367.354.990,22	21,17	
1.5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	1.735.000.000,00	367.354.990,22	21,17	
	JUMLAH	199.661.481.933,00	112.389.227.834,72	56,29	

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. EKO SUGIONO, MM +
 Pembina
 NIP. 010.170.778

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Propinsi Jawa Timur
 2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
 Selds Jawa Timur.



Tulungagung, 16 Oktober 2021

Kepada : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
3. Kepala Dinas Perimbangan Keuangan Kabupaten Tulungagung
4. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
9. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
17. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung
18. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
23. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
24. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
25. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
27. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
30. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
32. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
33. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung
34. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung
35. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung
36. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
37. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung

Kepada : Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
3. Kepala Dinas Perimbangan Keuangan Kabupaten Tulungagung
4. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
9. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
17. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung
18. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung
20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung

Bersama ini disampaikan dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021 (hingga bulan September 2021)

KODE POS	REKONSILIASI	TARGET	REALISASI	%	Ket
1.1	NISA LEBIH TIL CAUD	428.898.333,00	428.898.333,00	100,00	
1.2	PAH	9.603.883.600,00	8.368.641.871,50	87,05	
1.2.1	Pajak Daerah	2.497.400.000,00	2.571.523.052,00	103,00	
1.2.2	Pajak Daerah Lain	3.122.843.900,00	3.351.845.050,00	107,34	
1.2.3	Dug. Laba Usaha Daerah	75.000.000,00	59.813.102,00	79,75	
1.2.4	Lain-lain Pendapatan	97.660.000,00	129.139.922,00	132,17	
1.3	BINA PERIMBANGAN	109.493.700.000,00	109.383.715.945,00	99,98	
1.3.1	Pas. Dana Hasil Pajak	10.430.000.000,00	9.511.167.064,00	91,28	
1.3.2	Pas. Dana Hasil Bukan Pajak	43.700.000,00	369.463.704,00	845,46	
1.3.3	Pas. Dana Alokasi Umum	178.000.000.000,00	174.562.482.000,00	97,78	
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENYIMPANAN YANG SAH	1.735.000.000,00	884.000.000,00	50,95	
1.5.1	Pas. Penyempurnaan dan Perbaikan	1.415.000.000,00	267.000.000,00	19,01	
1.5.2	Pas. Penyempurnaan Lain-lain	320.000.000,00	614.000.000,00	191,88	
1.6	DAFTAR BANTUAN	159.251.481.833,00	169.245.248.139,00	106,34	

Bersama ini disampaikan kepada:

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

(Tanda Tangan)

US. 2021/0000000000000000
Tulungagung, 16 Oktober 2021

TERSEDIAKAN

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
2. Kepala Dinas Perimbangan Keuangan Kabupaten Tulungagung
3. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
8. Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
16. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung
17. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tulungagung
18. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Talungagung, 09 Januari 2002

Nomec : 970/ 23 / 424.41 / 2002
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pendapatan Tahun Anggaran 2001 Laporan Bulan Desember 2001

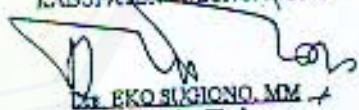
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Jawa Timur
di -
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 keadaan bulan Desember 2001 :

KODE POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%	Ket
1.1	SISA LEBIH TH. LALU	428,898,333.00	428,898,333.00	100.00	?
1.2	P A D	10,809,833,600.00	11,626,437,047.00	107.55	?
1.2.1.	Pajak Daerah	3,422,600,000.00	3,484,523,846.00	101.81	
1.2.2.	Retribusi Daerah	7,154,533,600.00	7,654,651,528.86	106.99	
1.2.3.	Bag. Laba Usaha Daerah	75,000,000.00	75,163,102.00	100.22	
1.2.4.	Lain-lain Pendapatan	157,660,000.00	412,098,570.14	261.38	
1.3	DANA PERIMBANGAN	245,115,239,037.00	233,095,827,721.00	95.10	?
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	8,890,257,350.00	10,412,233,807.00	117.25	
1.3.2.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1,574,981,687.00	884,545,061.00	56.19	
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum	234,660,000,000.00	221,798,648,853.00	94.52	
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	13,365,057,000.00	17,699,256,826.85	132.43	
1.5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	1,935,000,000.00	6,256,863,826.85	323.35	
1.5.4	Pos Penerimaan Lain-Lain	11,430,057,000.00	11,442,393,000.00	100.11	
	JUMLAH	269,719,017,970.00	262,850,419,927.85	97.45	

Demikian untuk menjadikan perkenan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG


EKO SUGIONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 170 779

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur ;
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur.

Disub/Dat/Peng/Wk/



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 09 Januari 2002

Nomor : 970 / 23 / 424.41 / 2002
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pendapatan Tahun Anggaran 2001 Laporan Bulan Desember 2001

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jawa Timur di-
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2001 kendum bulan Desember 2001 :

KODE POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%	Ket
1.1	SISA LEBIH TH. LALU	428,898,333.00	428,898,333.00	100.00	?
1.2	PAD	10,809,833,600.00	11,626,437,047.00	107.55	?
1.2.1.	Pajak Daerah	3,422,500,000.00	3,484,523,846.00	101.81	
1.2.2.	Retribusi Daerah	7,154,373,600.00	7,654,651,528.86	106.99	
1.2.3.	Bag. Laba Usaha Daerah	75,000,000.00	75,163,102.00	100.22	
1.2.4.	Lain-lain Pendapatan	157,660,000.00	412,098,570.14	261.38	
1.3	DANA PERIMBANGAN	245,115,239,037.00	233,095,827,721.00	95.10	2010-2011
1.3.1.	Pos Bagi Hasil Pajak	8,880,257,350.00	10,412,233,807.00	117.15	
1.3.2.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1,574,981,687.00	884,945,061.00	56.19	
1.3.3.	Pos Dana Alokasi Umum	234,660,000,000.00	221,798,648,853.00	94.52	
1.5	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YG SAH	13,365,057,000.00	17,699,256,826.85	132.43	
1.5.2	Pos Penerimaan dari Propinsi	1,935,000,000.00	6,256,863,826.85	323.35	
1.5.4	Pos Penyetaraan Lain-Lain	11,430,057,000.00	11,442,393,000.00	100.11	
	JUMLAH	269,719,017,970.00	261,850,419,917.85	97.45	

Demikian untuk menjadikan perikan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

EKO SUGIONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 170 779

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur.

Disk/Data/Peng. PAJ



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur 37 Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 20 - April 2002

Nomor : 8701-SP/ 1424.41/2002
 Sifat : Perling
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2002
Anggaran Bulan Maret 2002

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2002 keadaan bulan Maret 2002, dengan rincian sebagai berikut :

BAG. / POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%	KET.
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.087.281.513,98	8.087.281.513,98	100,00	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.319.558.000,00	4.153.856.831,73	31,18	
1.2.1	Pajak Daerah	4.188.000.000,00	1.852.252.487,00	37,51	
1.2.2	Retribusi Daerah	8.807.650.000,00	2.442.821.993,87	27,74	
1.2.3	Laba Usaha Daerah	98.000.000,00	7.780.020,00	7,92	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan	249.000.000,00	140.822.350,86	56,58	
1.3	DANA PERIMBANGAN	284.938.826.355,00	85.880.285.098,00	25,18	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	9.755.026.355,00	2.528.277.277,00	25,89	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.180.000.000,00	390.250.402,00	33,07	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	254.000.000.000,00	83.743.737.417,00	25,10	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAH	7.595.000.000,00	1.118.023.884,00	14,89	
1.5.1	Hibah	-	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	7.595.000.000,00	1.118.023.884,00	14,89	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	-	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	UP,	0,00	0,00	
	JUMLAH	294.838.637.868,98	80.917.207.125,71	27,44	

Demiakan untuk dijadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

(Signature)
 Drs. EKO SUGIONO, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 779

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur

Disk/Program/Flle : Propinsi W94



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813
TULUNGAGUNG kode Pos 66217

Tulungagung, 16 Juli 2002

Nomor : 970/035/424.41/2002
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2002
Anggaran Bulan Juni 2002

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Jawa Timur
di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2002 keadaan bulan Juni 2002, dengan rincian sebagai berikut :

BAG. / POB	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	3.987.261.013,98	3.987.261.613,98	100,00	
1.2	PENDAPATAN ABLI DAERAH	13.319.560.000,00	6.730.246.273,54	85,84	
1.2.1	Pajak Daerah	4.185.000.000,00	2.743.522.071,00	65,67	
1.2.2	Retribusi Daerah	8.907.650.000,00	5.228.941.486,62	59,37	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	68.000.000,00	17.760.020,00	18,12	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan	249.000.000,00	740.022.716,92	297,20	
1.3	DANA PERUMBANGAN	264.036.826.355,00	135.711.648.358,00	51,22	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	9.750.826.355,00	4.945.859.039,00	50,80	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.180.000.000,00	739.760.402,00	62,69	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	254.000.000.000,00	130.026.236.917,00	51,19	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAH	7.595.000.000,00	3.674.952.103,21	48,39	
1.5.1	H i b a h	-	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	7.595.000.000,00	3.674.952.103,21	48,39	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	-	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	U.P.	0,00	0,00	
	J U M L A H	294.838.637.668,98	107.104.105.248,73	53,28	

Demikian untuk menjadikan perkas.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. EKO SUGIONO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 170 779

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Jawa Timur

Disk/Program File : Propnal.Wkf

16 Juli 2002



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 68217

Tulungagung, 17 Oktober 2002

Nomor : 870/1499/424.41/2002
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2002
 Anggaran Bulan September 2002

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Ekonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2002 keadaan bulan September 2002, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POB	JENIS PUNGUTAN	TARGET PAK 2002	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	9.205.000.000,48	8.987.261.613,98	97,83	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.332.601.800,00	13.633.885.933,08	83,57	
1.2.1	Pajak Daerah	4.680.000.000,00	4.185.697.751,00	89,56	
1.2.2	Retribusi Daerah	10.334.000.000,00	8.217.991.064,89	79,52	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	88.601.800,00	43.861.820,00	44,48	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.040.000.000,00	1.208.436.317,39	116,00	
1.3	DANA PERIMBANGAN	276.021.830.415,00	205.457.696.484,42	74,44	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	11.898.600.200,00	6.520.826.879,00	71,68	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.386.250.215,00	1.201.485.388,42	88,00	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	262.770.000.000,00	184.736.404.417,00	74,11	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	1.000.000.000,00	-	
1.5	LAIK - LAIK PENERIMAAN YANG SAH	40.725.121.000,00	9.877.837.508,18	92,10	
1.5.1	Hibah	-	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	6.365.121.000,00	8.304.506.608,18	99,28	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	-	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	2.360.000.000,00	1.573.332.000,00	66,67	
	J U M L A H	312.304.580.204,48	237.936.681.459,66	76,19	

Demikian untuk menjadikan perkas.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. EKO SUGIONO, MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 779

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur

Dkk/Sugram/F3e : Propinal/CLS



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 68217

Tulungagung, 17 Januari 2003

Nomor : 0701/47/1024.41/2002
 Sifat : Penting
 Lembaran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahun 2002
 Anggaran Bulan Desember 2002

Kepada :
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
 SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2002
 keadaan bulan Desember 2002, dengan rincian sebagai berikut:

BAGIAN / POT.	JENIS PUNGUTAN	TARGET PAK 2002	REALISASI	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	BISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.200.000.000,00	8.887.261.513,68	97,83	
1.2	PENYEMPATAN ASLI DAERAH	10.330.000.000,00	10.380.928.836,51	112,40	
1.2.1	Pejak Daerah	4.860.000.000,00	5.402.886.174,00	110,71	
1.2.2	Retribusi Daerah	10.330.000.000,00	11.248.718.039,19	108,85	
1.2.3	Lebu Usaha Daerah	93.500.000,00	108.981.820,00	107,87	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.040.000.000,00	1.823.180.802,32	166,06	
1.3	DANA PERMBANGUNAN	270.000.000.000,00	231.300.745.385,00	101,04	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	11.330.000.000,00	14.198.405.740,00	124,24	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.390.000.000,00	1.645.339.548,00	118,36	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	257.770.000.000,00	222.770.000.000,00	100,00	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	UP	2.000.000.000,00	-	
1.3.5	Dana Darurat	UP	UP	-	
1.5	LAIN - LAIN PEMBERSAHAN YANG SAH	10.725.121.000,00	18.897.573.310,54	174,33	
1.5.1	Hibah	UP	UP	-	
1.5.2	Pembantuan dan Prorogasi	8.365.121.000,00	14.800.278.060,54	174,54	
1.5.3	Pembantuan dan Kabupaten / Kota Lainnya	UP	UP	-	
1.5.4	Pembantuan Lain - Lain	2.360.000.000,00	4.097.295.250,00	113,91	
	J U M L A H	310.304.820.204,48	327.441.599.049,65	104,85	

Ditanda untuk menjabarkan perke.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ors. EKO BUGHICHO, MM.
 Peminda Tingkat I
 NIP. 010 170 078

TAMBAHAN

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Propinsi Jawa Timur
 2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
 Sekretariat Daerah Jawa Timur

Dinas/Program/Fiskal : Propinsi & LS



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 65217

Tulungagung, 22 April 2003

Nomor : 970/129/407.105/2003
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2003
 Anggaran Bulan Maret 2003

Kepada
 Yth. Sdr.,
 Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2003 keadaan bulan Maret 2003, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2003	REALISASI TAHUN 2003	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	BISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	9.577.710.333,00	9.577.710.333,00	100,00	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.462.814.000,00	6.352.713.498,67	32,68	
1.2.1	Pajak Daerah	5.090.000.000,00	2.083.750.997,00	41,13	
1.2.2	Retribusi Daerah	12.815.854.000,00	3.528.024.504,87	27,51	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	166.880.000,00	7.582.237,00	4,52	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.390.000.000,00	726.375.758,70	52,19	
1.3	DANA PERMBANGAN	320.827.386.512,00	102.016.744.157,00	31,79	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	12.521.266.512,00	1.628.323.184,00	13,00	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.558.000.000,00	332.420.993,00	21,36	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	300.150.000.000,00	100.050.000.000,00	33,33	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	8.700.000.000,00	-	-	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG BAH	37.003.380.000,00	13.004.365.498,00	36,50	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	13.003.380.000,00	6.299.203.498,00	40,75	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	24.000.000.000,00	8.206.182.000,00	34,19	
	J U M L A H	386.961.270.845,00	131.445.533.474,67	33,97	

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. EKO SUGIONO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 779

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321013
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 16 Juli 2003

Nomor : 970/628/407.105/2003
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2003
 Anggaran Bulan Juni 2003

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2003 keadaan bulan Juni 2003, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN/ POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2003	REALISASI TAHUN 2003	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	9.577.710.333,00	9.577.710.333,00	100,00	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.452.914.000,00	12.504.543.391,24	64,28	
1.2.1	Pajak Daerah	5.000.000.000,00	3.824.448.002,00	75,14	
1.2.2	Retribusi Daerah	12.816.854.000,00	7.088.516.081,38	55,31	
1.2.3	Laban Usaha Daerah	158.800.000,00	308.147.610,35	235,10	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.390.000.000,00	1.222.330.497,69	87,94	
1.3	DANA PERIMBANGAN	320.927.266.512,00	179.950.408.053,00	56,07	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	12.621.280.512,00	4.490.467.860,00	35,60	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	1.566.000.000,00	392.420.890,00	25,08	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	300.150.000.000,00	175.007.500.000,00	58,33	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	6.700.000.000,00	-	-	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	40.000.000,00	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAH	37.003.390.000,00	22.102.289.585,00	59,73	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Provinsi	13.003.380.000,00	7.743.221.085,00	59,55	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	24.000.000.000,00	14.358.068.500,00	59,83	
	JUMLAH	386.951.270.845,00	224.134.952.282,24	57,92	

Demiikian untuk dijadikan perkara.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. EKO SUGIONO, MM.

Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 779

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I
Madura
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 15 Oktober 2003

Nomor : 970/091/407.105/2003
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2003
 Anggaran Bulan September 2003

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Cita dan Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2003 keadaan bulat September 2003, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET PAK T/ JUN 2003	REALISASI TAHUN 2003	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	BISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	21.488.143.194,51	21.488.143.194,51	100,00	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.206.377.501,00	19.128.135.140,83	82,43	
1.2.1	Pajak Daerah	8.840.000.000,00	6.038.876.822,00	68,30	
1.2.2	Retribusi Daerah	13.998.917.000,00	10.864.870.380,20	77,78	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	158.960.501,00	419.108.311,35	267,02	
1.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah	2.212.600.000,00	1.784.879.540,23	80,67	
1.3	DANA PERMISANGAN	322.126.975.993,00	263.421.314.090,00	81,78	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	14.629.556.000,00	10.722.973.184,00	73,30	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	648.420.893,00	523.340.000,00	80,71	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	300.150.000.000,00	250.125.000.000,00	83,33	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	0.700.000.000,00	2.010.000.000,00	30,00	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	40.000.000,00	-	
1.4	PENJAJAN PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG BAH	41.025.313.394,00	32.471.247.304,00	79,01	
1.5.1	Pencicilan dan Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Provinsi	16.689.725.934,00	11.808.282.384,00	76,22	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	24.835.587.000,00	20.612.965.000,00	79,09	
	J U M L A H	408.448.810.582,51	336.508.839.928,34	82,39	

Demiikian untuk menjadikan perkara.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dr. EKO SUGIONO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 170 779

Zembaran :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Medan
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 20 Januari 2004

Nomor : 970/95/407.106/2004
 Sifat : Penting
 Lembaran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2003
 Bulan Desember 2003

Kepada
 Yth. Sdr.,
 Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2003 keadaan bulan Desember 2003, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN/ POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET PAK TAHUN 2003	REALISASI TAHUN 2003	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	BISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	21.488.143.194,51	21.488.143.194,51	100,00	
1.2	PENDAPATAN ABLI DAERAH	23.206.377.501,00	26.314.412.188,45	113,39	
1.2.1	Pejak Daerah	8.840.000.000,00	8.084.588.120,00	118,20	
1.2.2	Retribusi Daerah	13.996.917.000,00	14.810.152.050,74	105,81	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	166.980.501,00	830.242.076,57	401,53	
1.2.4	Lain - Lain Pendapatan Daerah	2.212.600.000,00	2.789.451.960,14	126,08	
1.3	DAK PERIMBANGKAN	322.126.875.993,00	326.045.064.375,00	101,22	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	14.028.555.000,00	17.977.765.585,00	122,60	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	848.420.893,00	1.217.288.289,00	167,79	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	300.150.000.000,00	300.150.000.000,00	100,00	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	6.700.000.000,00	6.799.000.000,00	101,48	
1.3.5	Dana Derivat	UP,	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP,	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP,	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG BAH	41.825.313.894,00	44.466.667.161,00	106,33	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP,	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	15.889.725.894,00	16.663.106.807,00	118,65	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP,	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	25.935.587.000,00	26.803.560.354,00	99,49	
	J U M L A H	408.448.810.882,51	416.314.287.416,98	102,42	

Demiikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dr. EKO SUGIONO, MM.
 Pemula Tingkat I
 NIP. 010 170 779

Terlampir :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I
Medan
4. Sdr. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Timur di Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 13 April 2004

Nomor : 970/419/407.105/2004
 Sifat : Penting
 Lembaran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2004
 Bulan Maret 2004

Kepada
 Yth.Sdr. Kepala Biro Bina Ekonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2004 keadaan bulan Maret 2004, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POG	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2004	REALISASI TAHUN 2004	%	KBT.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.047.099.100,00	8.047.099.000,00	100,00	
1.2	PENDAPATAN ABLI DAERAH	25.140.034.900,00	6.610.070.549,28	26,29	
1.2.1	Pajak Daerah	7.518.000.000,00	2.088.479.085,00	27,78	
1.2.2	Retribusi Daerah	15.360.334.800,00	4.342.850.895,76	28,27	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	176.200.000,00	43.082.300,00	24,40	
1.2.4	Lain - Lain Pendapatan Daerah	2.088.500.000,00	135.549.166,61	6,50	
1.3	DANA PERIMBANGAN	334.245.513.123,00	105.544.008.403,00	31,58	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	15.514.858.000,00	1.204.106.493,00	8,34	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	810.857.123,00	-	-	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	308.020.000.000,00	104.248.000.000,00	33,74	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	8.100.000.000,00	-	-	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG BAH	40.385.400.000,00	6.887.215.373,00	17,03	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	14.408.400.000,00	5.114.078.543,00	36,60	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	25.980.000.000,00	1.773.136.730,00	6,83	
	J U M L A H	403.819.047.023,00	128.088.393.358,28	31,33	

Demikian untuk merjadikan perkara.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

(Signature)
 Drs. EKO SUGIONO, MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 010 170 779

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I
Madura
4. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Timur di Tulungagung
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 15 JULI 2004

Nomor : 970/BA/1407.105/2004
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2004
Keadaan s/d. Bulan Juni 2004

Kepada
Yth.Sdr. Kepala Biro Sina Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2004 (keadaan s/d. Bulan Juni 2004), dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POB	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2004	REALISASI TAHUN 2004	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.540.903.869,39	8.540.903.869,39	100,00	
1.2	PENDAPATAN ABLI DAERAH	29.252.718.900,00	13.022.695.454,78	44,57	
1.2.1	Pajak Daerah	8.120.000.000,00	4.250.278.166,00	52,34	
1.2.2	Retribusi Daerah	18.494.557.400,00	8.302.450.646,86	45,03	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	105.881.600,00	244.159.803,37	231,61	
1.2.4	Lain - Lain Pendapatan Daerah	402.500.000,00	105.810.019,86	26,31	
1.3	DANA PERIMBANGAN	334.863.762.123,00	191.353.951.977,00	57,18	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	15.701.193.000,00	5.886.617.461,00	37,49	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	812.569.123,00	131.019.516,00	16,12	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	309.020.000.000,00	182.437.325.000,00	59,04	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	9.330.000.000,00	2.799.000.000,00	30,00	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAMA	75.088.382.815,81	33.512.857.911,00	44,64	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	14.000.535.000,00	8.025.095.466,00	57,32	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	60.801.726.815,81	25.587.541.446,00	42,09	
	J U M L A H	444.046.747.708,00	346.430.194.212,17	77,79	

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 510 062 644

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I
Madun
4. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendapatan
Propinsi Jawa Timur di Tulungagung
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 15 Oktober 2004

Nomor : 970/157/407.105/2004
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2004
 Keadaan s/d. Bulan Sept. 2004

Kepada
 Yth.Scr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
 di **SURABAYA**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2004 keadaan s/d. Bulan September 2004, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2004	REALISASI TAHUN 2004	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	BISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.540.903.869,39	8.540.903.869,39	100,00	
1.2	PENDAPATAN AGLI DAERAH	26.252.718.900,00	16.603.469.509,66	73,09	
1.2.1	Pajak Daerah	8.120.000.000,00	5.888.851.108,00	73,40	
1.2.2	Retribusi Daerah	16.484.667.400,00	12.428.547.216,55	76,39	
1.2.3	Labu Usaha Daerah	106.001.600,00	301.769.063,37	142,55	
1.2.4	Lain - Lain Pendapatan Daerah	482.600.000,00	268.102.131,79	57,99	
1.3	DANA PERIMBANGAN	334.663.782.123,00	275.737.107.311,00	82,39	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	15.701.193.000,00	12.182.700.376,00	77,46	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	812.589.125,00	456.497.441,00	74,52	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	300.020.000.000,00	267.523.000.000,00	89,33	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	9.930.000.000,00	5.589.000.000,00	56,00	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG BAH	75.588.352.815,61	43.839.438.343,00	58,00	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	14.606.535.000,00	15.388.937.733,00	104,78	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	60.901.728.015,61	28.450.531.210,00	46,72	
	JUMLAH	444.043.747.708,00	347.081.030.133,04	78,16	

Demikian untuk menjadikan perkara.

79,99

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG



TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madun
4. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Tulungagung
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37, Telp. (0365) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 14 Januari 2005

Nomor : 970/058 /407.105/2005
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pendapatan Tahun 2004
 Keadaan s/d. Bulan Desember 2004

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
 di
SURABAYA

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2004 keadaan s/d. Bulan Desember 2004, dengan rincian sebagai berikut :

BAGIAN / POS	JENIS PUNGUTAN	TARGET TAHUN 2004	REALISASI TAHUN 2004	%	KET.
1	2	3	4	5	6
1.1	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU	8.540.903.869,39	8.540.903.869,39	100,00	
1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.252.718.000,00	26.394.838.205,41	104,60	
1.2.1	Pajak Daerah	8.120.000.000,00	8.814.432.271,00	108,55	
1.2.2	Retribusi Daerah	16.494.557.400,00	17.344.180.467,79	105,17	
1.2.3	Lain Usaha Daerah	165.951.600,00	348.908.853,37	209,99	
1.2.4	Lain - Lain Pendapatan Daerah	462.000.000,00	387.308.613,25	83,83	
1.3	DANA PERIMBANGAN	334.663.762.123,00	342.306.907.779,00	102,28	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak	15.701.193.000,00	23.194.174.253,00	147,72	
1.3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	612.669.123,00	760.733.526,00	124,33	
1.3.3	Dana Alokasi Umum	309.020.000.000,00	309.024.000.000,00	100,00	
1.3.4	Dana Alokasi Khusus	9.330.000.000,00	9.330.000.000,00	100,00	
1.3.5	Dana Darurat	UP.	-	-	
1.4	P I N J A M A N PEMERINTAH DAERAH	UP.	-	-	
1.4.1	Pinjaman Dalam Negeri	UP.	-	-	
1.5	LAIN - LAIN PENERIMAAN YANG SAH	73.538.362.815,61	82.559.421.742,32	111,63	
1.5.1	Penerimaan dari Pemerintah	UP.	-	-	
1.5.2	Penerimaan dari Propinsi	14.686.836.000,00	21.330.901.220,00	145,24	
1.5.3	Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya	UP.	-	-	
1.5.4	Penerimaan Lain - Lain	60.901.726.815,61	61.228.620.522,32	100,54	
	J U M L A H	444.046.747.709,00	460.302.071.606,12	103,66	

Demikian untuk dijadikan periksa.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 510 062 644

TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madun
4. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Tulungagung
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung

Lampiran II

NOMOR	U R A I A N		J U M L A H		NOMOR	U R A I A N		J U M L A H	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENERIMAAN :				PENGELUARAN BUDJIT :				
	1	Rp 2.946.339.005,24	Rp 3.213.836.049,93	1.	Belanja Pegawai	Rp 190.211.469.820,00	Rp 190.449.440.415,00		
	2	Rp 10.500.833.600,00	Rp 11.928.863.605,61	2.	Belanja Barang	Rp 13.767.849.441,00	Rp 13.582.388.161,00		
				3.	Belanja Pemeliharaan	Rp 2.481.357.500,00	Rp 2.351.414.224,00		
	a	Rp 3.422.520.000,00	Rp 3.404.523.046,00	4.	Belanja Perjalanan	Rp 1.865.820.400,00	Rp 1.681.546.976,00		
	b	Rp 7.154.573.600,00	Rp 7.413.729.306,67	5.	Belanja Lain - lain	Rp 5.681.577.127,92	Rp 5.495.520.900,00		
				6.	Anggaran Pinjaman Hilang dan Bunga	Rp 450.720.000,00	Rp 450.662.959,00		
				7.	Belanja Personel dan Organisasi	Rp -	Rp -		
				8.	Bantuan Keuangan	Rp 1.014.030.000,00	Rp 1.014.930.000,00		
				9.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 2.905.020.000,00	Rp 2.876.327.064,00		
				10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 500.000.000,00	Rp 375.000.000,00		
					PENGGELUARAN PEMBANTUAN :				
		Rp 245.115.239.037,00	Rp 245.904.916.636,00	B.	Sektor Industri	Rp 44.277.570.153,32	Rp 45.391.292.178,00		
				1.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 287.500.000,00	Rp 287.500.000,00		
				2.	Sektor Sumber Daya Air dan Energi	Rp 3.530.895.000,00	Rp 3.527.016.750,00		
				3.	Sektor Tenaga Kerja	Rp 802.100.000,00	Rp 798.260.000,00		
				4.	Sektor Perdagangan, Pengembangan dan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 205.000.000,00	Rp 205.000.000,00		
				5.	Sektor Transportasi	Rp 5.219.000.000,00	Rp 5.169.000.000,00		
				6.	Sektor Perumahan dan Energi Daerah	Rp 12.050.159.000,00	Rp 11.659.408.700,00		
				7.	Sektor Perawatan & Telekomunikasi Daerah	Rp 110.000.000,00	Rp 110.000.000,00		
				8.	Sektor Pengembangan Daerah dan Pemukiman	Rp 589.000.000,00	Rp 589.000.000,00		
				9.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tala Ruang	Rp 10.139.913.353,00	Rp 9.703.314.348,00		
				10.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperawatan dan Riset	Rp 260.000.000,00	Rp 260.000.000,00		
				11.	Tuhan Yang Maha Esa dan Raga	Rp 1.209.000.000,00	Rp 1.203.900.000,00		
				12.	Sektor Kesehatan dan Keluarga Sejahtera	Rp 230.000.000,00	Rp 230.000.000,00		
				13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 1.839.548.820,32	Rp 1.839.025.590,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	
			41					
			1.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	5.705.000,00	Rp	5.705.000,00
			2.	Sektor Agama	Rp	2.065.000,00	Rp	2.065.000,00
			3.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	1.985.000,00	Rp	1.985.000,00
			7.	Sektor Hukum	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00
			8.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp	35.459.712,00	Rp	35.459.712,00
			9.	Sektor Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Masa	Rp	3.874.700,00	Rp	3.874.700,00
			10.	Sektor Kelembagaan dan Kekerifatan	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00
				JUMLAH	Rp	444.045.747.708,00	Rp	444.045.747.708,00
B.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	60.197.274.231	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	27.339.360.945,00	Rp	60.436.355.193,00
	JUMLAH	Rp	521.454.859.519	JUMLAH	Rp	471.385.108.653,00	Rp	519.655.476.642,87

KODE	URAIAN		Jumlah	Realisasi	Nomor	URAIAN		Jumlah	Realisasi
		Anggaran					Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A	PENERIMAAN :				A	PENGELOMPOKAN RUTIN :			
	1. Bagian Sisa Lebih Pertanggung Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 9.205.006.989,48	Rp 9.370.181.364,81	1.	Belanja Pegawai	Rp 252.095.937.819,48	Rp 249.052.236.785,75		
	2. Bagian Pendapatan Asli Daerah :	Rp 15.352.501.800,00	Rp 18.626.183.243,96	2.	Belanja Barang	Rp 207.989.042.620,00	Rp 205.150.681.051,00		
	a. Pajak Daerah	Rp 4.880.000.000,00	Rp 5.402.685.174,00	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.307.931.500,00	Rp 10.542.568.158,00		
	b. Retribusi Daerah	Rp 10.334.000.000,00	Rp 11.037.833.742,26	4.	Belanja Perjalanan	Rp 3.412.469.500,00	Rp 3.232.498.032,00		
	c. Bagian Laba Perush. Milik Daerah	Rp 53.001.800,00	Rp 352.051.992,38	5.	Belanja Lain - lain	Rp 3.117.769.000,00	Rp 3.029.337.312,75		
	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang dijanjikan			6.	Anggaran Prorata Hibung dan Bunga	Rp 11.254.000.189,48	Rp 8.911.526.747,20		
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 1.040.000.000,00	Rp 1.833.532.335,22	7.	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pergubervan Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 450.700.000,00	Rp 426.463.574,50		
	3. Bagian Dana Perimbangan :	Rp 276.021.850.415,00	Rp 281.407.903.951,81	8.	Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp 509.930.000,00	Rp 1.509.535.500,00		
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 11.895.500.200,00	Rp 15.027.497.564,00	9.		Rp 5.074.500.000,00	Rp 4.582.200.150,00		
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	Rp 1.385.250.215,00	Rp 1.510.405.387,81	10.		Rp 1.000.000.000,00	Rp 2.257.000.000,00		
	c. Dana Alokasi Umum	Rp 262.770.000.000,00	Rp 262.770.000.000,00						
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	B.	PENGELOMPOKAN PEMBANGUNAN :				
	e. Dana Darurat	Rp -	Rp 2.000.000.000,00	1.	Sektor Industri	Rp 60.207.692.385,00	Rp 57.537.501.320,00		
	4. Bagian Prorata Pemeliharaan Daerah :	Rp -	Rp -	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp 300.000.000,00	Rp 289.705.000,00		
	a. Prorata Dalam Negeri	Rp -	Rp -	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp 3.032.915.000,00	Rp 3.029.122.260,00		
	b. Prorata Luar Negeri	Rp -	Rp -	4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp 1.009.500.000,00	Rp 1.001.013.000,00		
	5. Bagian Lain - lain Penerimaan yang sah :	Rp 10.725.121.000,00	Rp 18.675.214.749,55	5.	Sektor Pertambangan, Pengerbang dan Koperasi	Rp 300.000.000,00	Rp 290.000.000,00		
	a. Penerimaan dari Pemintah	Rp -	Rp -	6.	Sektor Transportasi	Rp 4.521.500.000,00	Rp 4.520.176.000,00		
	b. Penerimaan dari Propinsi	Rp 8.365.121.000,00	Rp 14.579.620.999,55	7.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 18.732.015.400,00	Rp 18.663.772.525,00		
	c. Penerimaan dari Kabupaten/ Kota Lainnya	Rp -	Rp -	8.	Sektor Perwisata & Telekomunikasi	Rp 115.000.000,00	Rp 115.000.000,00		
	d. Penerimaan Lain - lainnya	Rp 2.360.000.000,00	Rp 4.097.593.750,00	9.	Daerah	Rp 670.000.000,00	Rp 649.455.000,00		
				10.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp 16.975.483.745,00	Rp 14.666.631.126,00		
				11.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp 391.000.000,00	Rp 381.000.000,00		
				12.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Nasih onal, Keperawatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pemuda & Olah Raga	Rp 2.775.000.000,00	Rp 2.632.600.405,00		
				13.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 260.728.000,00	Rp 260.728.000,00		
					Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp 2.292.000.000,00	Rp 2.161.484.280,00		

1	2	3	4	5	6	7	8				
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	790.000.000,00	Rp	763.650.000,00		
				17.	Sektor Hukum	Rp	160.000.000,00	Rp	155.949.000,00		
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp	5.500.364.000,00	Rp	5.555.715.280,00		
				19.	Sektor Politik, Peningkatan, Komunitas dan Media Massa	Rp	3.555.000.000,00	Rp	294.949.550,00		
				20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000,00		
				21.	Bantuan Membangun Kepariwisata Daerah Bawahah	Rp	-	Rp	-		
	JUMLAH	Rp	272.236.469.242,24	Rp	278.636.693.120,59	JUMLAH	Rp	272.236.469.242,24	Rp	266.640.494.930,11	
B.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	29.710.672.000,00	Rp	26.302.269.653,50	C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	29.710.672.000,00	Rp	25.425.578.603,00
	JUMLAH	Rp	301.947.141.242,24	Rp	305.138.962.774,09	JUMLAH	Rp	301.947.141.242,24	Rp	296.065.073.533,11	

NOMOR	URAIAN	JUMLAH		NOMOR	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PENERIMAAN			A.	PENGELUARAN		
	1. Bagian Sisa Lebih Pemungutan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 21.469.143.194,51	Rp 21.766.270.112,51	1.	Belanja Pegawai	Rp 244.375.305.820,00	Rp 244.834.926.912,00
	2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	Rp 23.206.377.501,00	Rp 26.259.266.268,45	2.	Belanja Barang	Rp 23.856.817.475,00	Rp 24.318.928.120,00
	a. Pajak Daerah	Rp 6.840.000.000,00	Rp 8.064.560.120,00	3.	Belanja Pemeliharaan	Rp 4.672.745.000,00	Rp 4.561.123.671,00
	b. Retribusi Daerah	Rp 13.995.917.000,00	Rp 14.755.005.117,74	4.	Belanja Perjalanan	Rp 4.483.450.000,00	Rp 4.419.921.950,00
	c. Bagian Laba Perusa. Milik Daerah/ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 156.960.501,00	Rp 630.242.075,57	5.	Belanja Lain - lain	Rp 19.344.762.594,51	Rp 17.217.855.550,47
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 2.212.500.000,00	Rp 2.769.451.060,14	6.	Anggaran Pinjaman Hilang dan Bunga	Rp 452.300.000,00	Rp 452.211.674,20
	3. Bagian Dana Perimbangan	Rp 322.126.975.933,00	Rp 326.045.064.675,00	7.	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 3.404.090.000,00	Rp 3.484.000.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 14.528.555.000,00	Rp 17.977.765.596,00	8.	Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain	Rp 11.760.500.000,00	Rp 13.400.927.230,59
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 646.420.993,00	Rp 1.217.299.289,00	9.	Pengeluaran Tidak Tersempai	Rp 500.000.000,00	Rp 633.067.350,00
	c. Dana Alokasi Umum	Rp 300.150.000.000,00	Rp 300.150.000.000,00	B.	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	Rp 95.541.879.333,00	Rp 96.543.661.910,00
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp 6.700.000.000,00	Rp 6.700.000.000,00	1.	Sektor Industri	Rp 240.000.000,00	Rp 240.000.000,00
	e. Dana Darurat	Rp -	Rp -	2.	Sektor Perumahan dan Ketenagakerjaan	Rp 3.957.250.000,00	Rp 4.055.591.400,00
	4. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Nisiali	Rp 2.075.790.000,00	Rp 2.071.073.577,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	Rp -	Rp -	4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp 320.000.000,00	Rp 320.000.000,00
	b. Pinjaman Luar Negeri	Rp -	Rp -	5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp 5.475.000.000,00	Rp 5.468.350.000,00
	5. Bagian Lain - lain Penerimaan yang sah	Rp 41.625.313.684,00	Rp 44.466.667.161,00	6.	Sektor Transportasi	Rp 23.999.670.000,00	Rp 23.920.911.750,00
	a. Penerimaan dari Pemerintah	Rp -	Rp -	7.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp 850.000.000,00	Rp 849.427.000,00
	b. Penerimaan dari Propinsi	Rp 15.689.726.994,00	Rp 18.603.105.607,00	8.	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	Rp 905.000.000,00	Rp 603.317.500,00
	c. Penerimaan dari Kabupaten/ Kota Lainnya	Rp -	Rp -	9.	Sektor Pertambangan Daerah	Rp 4.597.397.293,00	Rp 5.832.624.663,00
	d. Penerimaan Lain - lainnya	Rp 25.935.587.000,00	Rp 25.863.560.354,00	10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.247.962.500,00
				11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Keperayaan, Olahraga dan Yang Melia Esa Pemuda & Olah Raga	Rp 7.649.251.900,00	Rp 7.521.637.220,00
				12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp 667.500.000,00	Rp 697.500.000,00
				13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pembedayaan Perempuan	Rp 3.254.470.140,00	Rp 3.236.119.249,00

1	2	3	4	5	6	7	8		
				14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp	972.316.000,00	Rp	972.316.000,00
				15.	Sektor Agama	Rp	274.000.000,00	Rp	274.000.000,00
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	883.726.240,00	Rp	883.726.240,00
				17.	Sektor Hukum	Rp	320.000.000,00	Rp	320.000.000,00
				18.	Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	Rp	5.039.000.000,00	Rp	5.039.000.000,00
				19.	Sektor Publik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	Rp	1.355.000.000,00	Rp	1.355.000.000,00
				20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp	184.507.000,00	Rp	184.507.000,00
				21.	Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan	Rp	-	Rp	-
	JUMLAH	Rp	312.304.560.204,48	Rp	328.080.483.310,23	Rp	312.304.560.204,48	Rp	308.881.840.115,72
B.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	27.339.350.945,00	Rp	34.854.169.164,00	Rp	27.339.350.945,00	Rp	34.854.169.164,00
	JUMLAH	Rp	339.643.941.149,48	Rp	362.944.652.474,23	Rp	339.643.941.149,48	Rp	341.560.159.394,72

RINGKASAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN TULLUNGGA
 TAHUN ANGGARAN 2004

NOMOR	URAIAN		JUMLAH		URAIAN	JUMLAH	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PLUMBING		BENGLUARAN BUNTI				
	1. Bagian Sisa Lebih Penjualan Anggaran Tahun Yang Lalu	Rp 6.540.903,83	Rp 8.540.903,83			Rp 333.655.327,70	Rp 356.239.049,13
	2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	Rp 25.252.718,90	Rp 27.209.728,81			Rp 274.249.840,20	Rp 275.918.516,68
	a. Pajak Daerah	Rp 9.120.000,00	Rp 8.814,43			Rp 25.150.866,10	Rp 23.255.623,27
	b. Retribusi Daerah	Rp 16.434.557,40	Rp 17.046.039,77			Rp 4.729.550,00	Rp 4.577.013,74
	c. Bagian Laba Penjualan, Misk Daerah Hasil Pengadaan Kewyasan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 185.631.500,00	Rp 344.489,57			Rp 4.552.895,00	Rp 5.603.297,50
	3. Bagian Dana Perimbangan	Rp 334.853.762,12	Rp 342.306.907,79			Rp 14.995.126,30	Rp 16.189.129,68
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp 15.701.193,00	Rp 23.194.174,33			Rp 333.000,00	Rp 966.418,54
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 612.589,12	Rp 758.733,34			Rp 4.462.430,00	Rp 4.399.458,62
	c. Dana Alokasi Umum	Rp 309.020,00	Rp 309.024,00			Rp 9.190,00	Rp 10.148,00
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp 9.330.000,00	Rp 9.330,00			Rp 1.200.000,00	Rp 3.151.093,00
	e. Dana Darurat	Rp -	Rp -			Rp 10.330.420,00	Rp 101.159.432,31
	4. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -			Rp 923.300,00	Rp 822.950,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	Rp -	Rp -			Rp 3.881.500,00	Rp 3.837.017,50
	b. Pinjaman Luar Negeri	Rp -	Rp -			Rp 1.150.000,00	Rp 1.138.894,70
	5. Bagian Lain-lain Perorangan yang sah	Rp 75.588.362,31	Rp 83.210,04			Rp 528.000,00	Rp 528.000,00
	a. Perorangan dari Pemerintah Kota Lainnya	Rp -	Rp -			Rp 4.570.000,00	Rp 4.534.505,00
	b. Perorangan dari Propinsi	Rp 14.586.638,00	Rp 21.330,90			Rp 22.750.000,00	Rp 22.098.281,43
	c. Perorangan dari Kabupaten Kota Lainnya	Rp -	Rp -			Rp 242.000,00	Rp 240.000,00
	d. Perorangan Lain-lainnya	Rp 60.901.728,31	Rp 61.879,14			Rp 686.000,00	Rp 646.000,00
						Rp 600.000,00	Rp 616.356,00
						Rp 869.000,00	Rp 824.975,00
						Rp 11.656.320,00	Rp 11.532.225,46
						Rp 1.765.000,00	Rp 1.782.639,25
						Rp 5.674.636,00	Rp 4.521.753,67

1	2	3	4	5	6	7	8				
3				14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp	6.167.000.000,00	Rp	6.163.916.100,00		
				15.	Sektor Agama	Rp	1.340.500.000,00	Rp	1.340.500.000,00		
				16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	2.035.000.000,00	Rp	1.935.000.000,00		
				17.	Sektor Hukum	Rp	305.000.000,00	Rp	305.000.000,00		
				18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pegawai	Rp	24.943.820.000,00	Rp	24.835.798.166,00		
				19.	Sektor Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa	Rp	5.090.000.000,00	Rp	5.043.001.765,00		
				20.	Sektor Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan	Rp	510.940.000,00	Rp	500.090.000,00		
	JUMLAH	Rp	408.446.610.582,51	Rp	418.537.766.410,63			Rp	409.996.364.547,57		
B.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	27.339.360.945,00	Rp	41.630.130.725,00	C.	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp	27.339.360.945,00	Rp	41.657.610.676,00
	JUMLAH	Rp	435.786.171.527,51	Rp	460.167.899.141,98			Rp	435.786.171.527,51	Rp	451.653.975.223,57

Lampiran III

Regresi Linier Sederhana

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
DDFD (Y)	,0568261	1,074245E-02	16
Penerimaan PAD (X)	5263538643,4606	1687161685,4451	16

Correlations

		DDFD (Y)	Penerimaan PAD (X)
Pearson Correlation	DDFD (Y)	1,000	,685
	Penerimaan PAD (X)	,685	1,000
Sig. (1-tailed)	DDFD (Y)	,	,002
	Penerimaan PAD (X)	,002	,
N	DDFD (Y)	16	16
	Penerimaan PAD (X)	16	16

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerimaan PAD (X)(a)	,	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DDFD (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,685(a)	,469	,431	,0081035

a. Predictors: (Constant), Penerimaan PAD (X)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,00081	1	,00081	12,361	,003(a)
	Residual	,00092	14	,00007		
	Total	,00173	15			

a Predictors: (Constant), Penerimaan PAD (X)

b Dependent Variable: DDFD (Y)

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,388E-02	,007		4,957	,000
	Penerimaan PAD (X)	4,360E-12	,000	,685	3,516	,003

a Dependent Variable: DDFD (Y)

Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered ^a	Variables Removed	Method
1	Penerimaan PAD (X) ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: DDFD (Y)

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,214 ^a

- a. Predictors: (Constant), Penerimaan PAD (X)
b. Dependent Variable: DDFD (Y)

Coefficients^a

Model		95% Confidence Interval for B	
		Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	,019	,049
	Penerimaan PAD (X)	,000	,000

- a. Dependent Variable: DDFD (Y)

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,0457	,0685	,0568	,0074	16
Residual	-,0114	,0167	,0000	,0078	16
Std. Predicted Value	-1,5157	1,5812	,0000	1,0000	16
Std. Residual	-1,4090	2,0578	,0000	,9661	16

- a. Dependent Variable: DDFD (Y)

Grafik Regresi

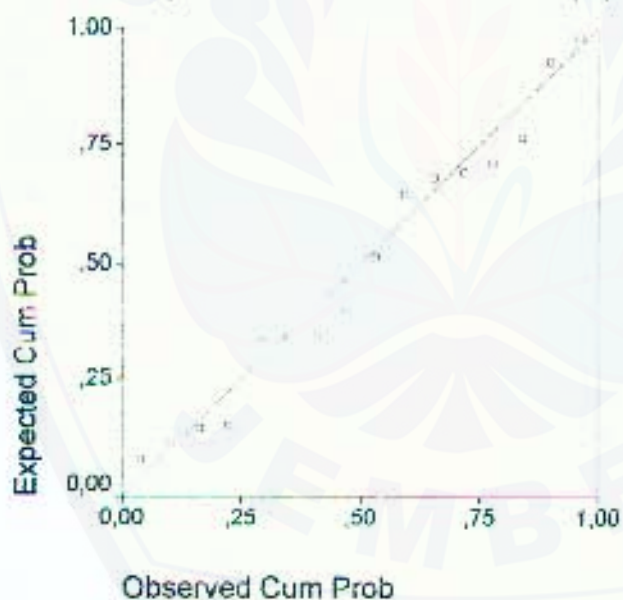
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	,0457	,0685	,0568	,0074	16
Std. Predicted Value	-1,5157	1,5812	,0000	1,0000	16
Standard Error of Predicted Value	,0021	,0039	,0026	,0006	16
Adjusted Predicted Value	,0429	,0684	,0568	,0074	16
Residual	-,0114	,0167	,0000	,0078	16
Std. Residual	-1,4090	2,0578	,0000	,9661	16
Stud. Residual	-1,4773	2,2308	,0014	1,0429	16
Deleted Residual	-,0126	,0196	,0000	,0091	16
Stud. Deleted Residual	-1,5494	2,6777	,0275	1,1306	16
Mahai. Distance	,0455	2,5003	,9375	,8699	16
Cook's Distance	,0003	,4360	,0860	,1334	16
Centered Leverage Value	,0030	,1667	,0625	,0580	16

a. Dependent Variable: DDFD (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standard

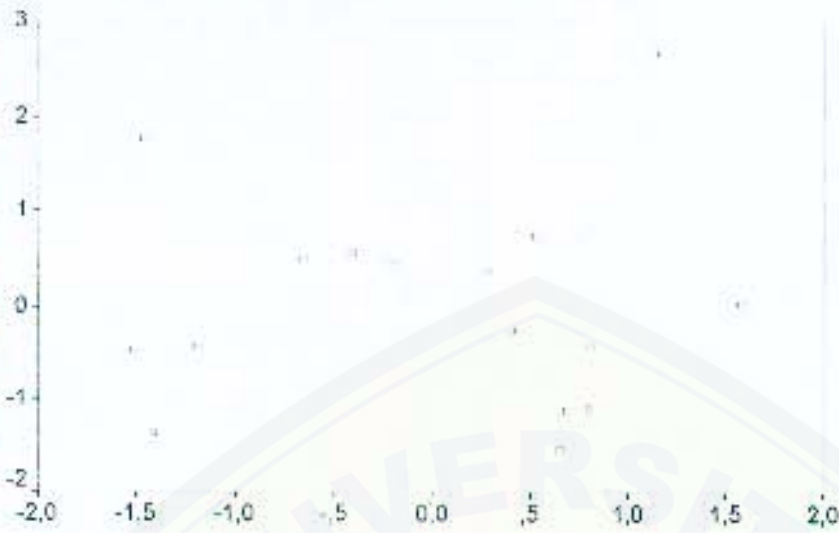
Dependent Variable: DDFD (Y)



Regression Studentized Deleted (Press) Residual

Scatterplot

Dependent Variable: DDFD (Y)



Regression Standardized Predicted Value

TABEL II
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t

α untuk uji dua pihak (two tail test)						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu pihak (one tail test)						
dk	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,820	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,488	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,165
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,716	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,178	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,132	2,603	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,743	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,755
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

Lampiran VII

No.	Peraturan Daerah	Tentang
1.	No.37 tahun 2001	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.	No.38 tahun 2001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.	No.39 tahun 2001	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
4.	No.40 tahun 2001	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
5.	No.41 tahun 2001	Retribusi Izin Trayek
6.	No.42 tahun 2001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
7.	No.43 tahun 2001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8.	No.44 tahun 2001	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
9.	No.45 tahun 2001	Retribusi Pengujian Hasil Hutan Di Kabupaten Tulungagung
10.	No.46 tahun 2001	Retribusi Rumah Potong Hewan
11.	No.47 tahun 2001	Retribusi Izin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk di Kabupaten Tulungagung
12.	No.48 tahun 2001	Retribusi Tuberkuliasi Pada Sapi Perah
13.	No.49 tahun 2001	Retribusi Kartu Identitas Ternak Dan Perubahan Kepemilikan Ternak
14.	No.50 tahun 2001	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dan Naskah Dinas
15.	No.51 tahun 2001	Pajak Reklame
16.	No.52 tahun 2001	Pajak Penerangan Jalan
17.	No.53 tahun 2001	Pajak Hiburan
18.	No.54 tahun 2001	Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
19.	No.55 tahun 2001	Pajak Hotel
20.	No.56 tahun 2001	Pajak Restoran
21.	No.04 tahun 2002	Retribusi Terminal
22.	No.05 tahun 2002	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kabupaten Tulungagung
23.	No.06 tahun 2002	Retribusi Tempat Khusus Parkir
24.	No.07 tahun 2002	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus / Jamban
25.	No.08 tahun 2002	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung
26.	No.09 tahun 2002	Retribusi Izin Usaha Peternakan
27.	No.10 tahun 2002	Retribusi Izin Pemutaran/Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik
28.	No.11 tahun 2002	Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan
29.	No.12 tahun 2002	Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan Kerja, Norma Kesehatan Kerja dan Norma Kerja
30.	No.13 tahun 2002	Retribusi Pelayanan Pasar

31.	No.14 tahun 2002	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
32.	No.15 tahun 2002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tulungagung
33.	No.16 tahun 2002	Retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Pemakaian Gudang (SIPG), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
34.	No.17 tahun 2002	Retribusi Izin Gangguan
35.	No.05 tahun 2003	Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
36.	No.06 tahun 2003	Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
37.	No.12 tahun 2003	Pajak Parkir
38.	No.13 tahun 2003	Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Telp. (0331) 337818, 339385 Fax. (0331) 337818 Jember 68121
E-mail : lenslit_uncj@jember.telkom.net.id

Nomor : 765/J25.3.1/PL.5/2005
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

19 Juli 2005

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
di -

TULUNGAGUNG.

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 3438/J25.1.2/PL.5/2005 tanggal 28 Juni 2005, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : LUFU AMARILIANA SOFIA / 01 - 1065
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Kiping, Gondang, Tulungagung (0355) 320100
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (P A D) Terhadap Ke-
mandirian Keuangan Daerah (suatu studi tentang Keman-
dirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Tulungagung).
Lokasi : Kabupaten Tulungagung
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Scr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 Jl. Yos Sudarso II No. 7 Telp. (0355) 320726 – 327556
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETERANGAN
 UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH
 NOMOR : 072/ 419 /A07.204/2005

Sesuai surat dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 19 Juli 2005 Nomor : 765/J25.3.1/FL.5/2005.
 Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey / Research oleh :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : LUPI AMARILIANA |
| 2. Jabatan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Desa Kiping Kec. Gondang Tulungagung |
| 4. Tempat yang dituju | : Bappeda, Diapenda, Keuangan dan BPS Kabupaten Tulungagung |
| 5. Keperluan | : Survey " PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH " |
| 6. Lamanya | : 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan. |
| 7. Pengikut / peserta | : - |
| 8. Keterangan | : - Penelitian wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat Survey / Research
- Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya Survey / Research melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung. |

Demikian untuk menjadikan maklum

Tulungagung, 26 Juli 2005

PII KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. H. RUKADJI ACHJAR

Pembina
 NIP. 510 063 314

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dan Dim 0807/Pasi I Tulungagung
2. Sdr. Kapires / Kabag Intelkam Tulungagung
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Kepala Diapenda Kab. Tulungagung
5. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Kab. Tulungagung
6. Sdr. Kepala BPS Kabupaten Tulungagung
7. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian CJ di Jember



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. A. Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321813
 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 072 / 422 / 105 / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa :

1. Nama : LUFU AMARILIA SOFIA
2. Alamat : Desa Kiping Gondang Tulungagung
3. Status : Mahasiswa Fakultas Sospol Universitas Jember

Yang bersangkutan telah melakukan Survey tentang : "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH " pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, mulai bulan April s/d Juni 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Tulungagung, 21 Desember 2005

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66219

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 045.2/2019/031/2005

Bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

- Nama : LUFU AMARILIANA SOFIA
- NIM : 010910201065
- Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
- Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Telah melaksanakan Penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH " Sejak Tanggal 26 Juli 2005 Sampai dengan 25 Oktober 2005

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tulungagung , 17 Nopember 2005

Kepala Bagian Keuangan

Drs. EDY SITYANTO, MSI
Pembina
NIP: 410 170 780

